

**PENYALAHGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

Oleh
M. FAJRUL MUBARAK AF
NIM. 10300107019

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 04 April 2011
Penyusun,

M. FAJRUL MUBARAK AF
NIM. 10300107019

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara M. Fajrul Mubarak AF, NIM: 10300107019, mahasiswa Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, ***“Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Gowa)”*** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

Gowa, 04 April 2012

Pembimbing II

Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
NIP. 19710402 200003 1 002

Drs. M. Tahir Maloko, M.Hi
NIP. 19631231 199503 1 006

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , له
وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt karena dengan Rahmat dan Kasih sayang-Nya sehingga penelitian dan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat terwujud. Salawat dan salam sejahtera penulis peruntukkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw., kepada keluarga, sahabat-sahabat dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dalam menegakkan agama Allah, membela yang haq dan memerangi yang bathil.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa)”**. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Penulis sadar bahwa, dalam penyusunan laporan penelitian dalam wujud skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berlapang dada untuk senantiasa menunggu koreksi dan saran yang konstruktif menuju kesempurnaan karya ini dan karya berikutnya. Dalam penyusunan laporan ini, penulis tidak berarti tidak mengalami kesulitan, tetapi dengan bantuan dan kontribusi dari semua pihak sehingga semua itu dapat teratasi. Untuk itu, penulis perlu berterimakasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka semua terutama kepada:

1. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda **Drs. H. M. Ahmad Muhajir AF, MH** dan Ibunda **HJ. ST. Faridah Rahman** tercinta yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan iringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Drs. Hamzah Hasan M.Hi, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.

5. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Drs. M. Tahir Maloko, M.HI, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Rahmiati, S.S kepala unit TK-TPA al-Amanah yang senantiasa menjadi motifator dan sumber inspirasi penulis, memberikan pelajaran arti hidup dengan cara kesabaran serta support serta meluangkan waktunya untuk membantu saya dengan sukarela hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Keluarga besarku Muh. Shadiqul Fajri AF, S.S, Ashrul Ihsan, S.Parm, M. Kes Dra. Rukmini Rahman dan semua paman, tante, dan sepupu tanpa terkecuali walau penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namanya, yang senantiasa hadir dalam kehidupanku dikala senang dan menghiburku dikala sedih serta senantiasa mendo'akan penulis.
9. Kepada ustadz dan ustadzah TK-TPA al-Amanah Kementerian Agama Kab. Gowa.
10. Terimakasih kepada seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kab. Gowa yang memberikan dorongan dan semangat dalam tahap penyelesaian studi.

11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Racana Almaida UIN Alauddin Makassar, atas segala jerih payahnya dalam mensupport penulis sehingga karya tulis ini dapat terwujud.
12. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan yang tidak sempat disebut namanya satu persatu, atas motifasi dan dorongannya kepada penulis sehingga tulisan ini dapat rampung.
13. Teman-teman KKN tanpa terkecuali yang memberikan pelajaran arti hidup dengan cara kesabaran dan saran serta memberikan kesan yang sangat berarti di akhir penyelesaian studi saya.

Kepada mereka inilah yang sepantasnya penulis berterimakasih, dengan harapan sekaligus do'a tulus penulis, "semoga jasa dan usaha mereka mendapatkan imbalan yang setimpal" dari Allah Swt. Amin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Wassalam

Gowa, 19 Desember 2011
Penulis,

M. FAJRUL MUBARAK AF

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Garis Besar Isi	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Zakat	13
a) Pengertian Zakat	13
b) Tujuan Zakat	15
c) Pengertian Zakat Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat	16
d) Zakat dalam Pandangan Hukum Islam	17
B. Zakat Produktif	19
a) Pengertian Zakat Produktif	19
b) Hukum Zakat Produktif	20
C. Konsep Mustahiq	22
D. Manajemen Pengelolaan Zakat	31
E. Penyalahgunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Mustahiq	43
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Pengolahan dan Analisis Data	50
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	52
) Sejarah Singkat BAZ	52
) Visi dan Misi BAZ Kab. Gowa	58

J. Wilayah Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZ Kab. Gowa	59
B. Persentasi Muzakki dan Mustahiq dalam lingkup BAZDA kab. Gowa	61
C. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa	64
D. Manfaat Zakat terhadap Muzakki dan Mustahiq	66
E. Analisis Zakat Menurut Hukum Islam	69
F. Pengeloaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa....	79
G. Pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : M. Fajrul Mubarak Af
NIM : 10300107019
Judul Skripsi : PENYALAHGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada
Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa).

Skripsi ini membahas tentang Penyalahgunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gowa). Pokok permasalahan adalah bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa dan bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa. Masalah ini dilihat dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan syar'i. Untuk menyelesaikan pokok permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode feeld research atau penelitian lapangan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa, mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak berbadan kuat boleh diberi secara konsumtif. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran¹. Islam sebagai ad-Diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)²

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, edisi 1. (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Syamil, 2007), h. 203.

yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.³ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam. Artinya zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui:

³ Abdurrahman Qadir, *op. cit.*, h. 83-84.

Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.⁴

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai

⁴ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, edisi 1. (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali 1987), h. 71.

modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁵

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat karena BAZ sebagai organisasi pemerintah yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Badan Amil Zakat Daerah menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas untuk bantuan modal yang berupa uang dan bantuan modal yang berupa hewan ternak. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Badan Amil Zakat Daerah, mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.⁶

Penyalahgunaan zakat produktif sering terjadi dikalangan mustahiq yang dapat menghambat program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Penyalahgunaan tidak hanya dikalangan mustahiq melainkan terjadi dikalangan pegawai BAZ itu sendiri sehingga terjadi kesulitan dalam pengentasan kemiskinan.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu syari'ah pada umumnya dan keuangan Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan mustahiq. Adapun bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Badan Amil Zakat Daerah atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat untuk pemberdayaan mustahiq.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1981), h. 52-53.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa?
2. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu penulis memberikan pemahaman tentang arti dan makna dari judul skripsi tersebut yang berjudul “Penyalahgunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam” agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya.

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan.⁷ Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1248.

Jadi yang dimaksud judul penelitian ini adalah tinjauan mengenai penerapan zakat produktif kepada para mustahiq dengan cara memberikan modal usaha yang didasarkan atas aturan-aturan syari'at Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan literatur meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, oleh Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pokok pikiran sebagai berikut:

-) Undang-Undang Republik Indonesia no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
-) Keputusan Menteri Agama RI nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
-) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

Merumuskan isi besar buku, Undang-undang tentang pengelolaan zakat, keputusan Menteri Agama RI tentang pelaksanaan Undang-Undang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan zakat yang merupakan petunjuk dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat.

2. Zakat dalam perspektif fiqh, sosial dan ekonomi oleh Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. Dengan pokok pikiran sebagai berikut:

-) Sumber-sumber zakat dalam sistem ekonomi
-) Manajemen zakat
-) Pendistribusian zakat
-) Aspek-aspek sosial dan ekonomi

Merumuskan isi besar buku, Zakat merupakan salah satu rukun Islam, secara hukum zakat adalah kewajiban, disisi lain mempunyai manfaat sosial dan ekonomi. Dalam kajian kontemporer zakat diberikan pada yang berhak (*mustahiq*) bukan hanya secara konsumtif, tetapi juga dengan cara produktif melalui investasi atau untuk pengembangan ekonomi umat dan mengatasi problema umat. Misalnya mendirikan pabrik-pabrik, tempat-tempat pendidikan, rumah sakit dan sebagainya.

3. Zakat dan peranannya dalam pembangunan bangsa serta kemaslahatannya bagi umat oleh Drs. Abdurrahim MA dan KH. Mubarak, MA. Dengan pokok pikiran sebagai berikut:

-) Macam-macam zakat dan ketentuannya
-) Sistem pengelolaan zakat secara modern dan profesional
-) Zakat dalam pembangunan bangsa

Merumuskan isi besar buku, Dalam agama Islam, ajaran tentang zakat penting untuk dihayati dan dilaksanakan oleh umatnya, mengingat bahwa dalam harta orang kaya itu terdapat hak kaum dhuafa yang harus dikeluarkan baik dalam zakat, infaq, shadaqah, serta amal sosial lainnya. Zakat sebagai ibadah amaliah mengandung banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan nilai ketakwaan kepada Tuhan maupun nilai kasih sayang dalam hubungan sosial antar individu.

4. Kekuatan zakat hidup berkah rezeki melimpah oleh Ust. Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika. Dengan pokok pikiran sebagai berikut:

-) Perintah berzakat bagi umat Muslim
-) Keutamaan berzakat
-) Fikih zakat
-) Sempurnakan zakat dengan sedekah

Merumuskan isi besar buku, Zakat hadir dalam Islam tak saja untuk mengatur masalah perekonomian masyarakat. Tapi juga menjadi penyambung kasih sayang serta penguat iman bagi umat Islam. Dengan berzakat, si kaya tersucikan harta dan hatinya dari kesombongan. Iman si miskin pun tak teracuni rasa dengki. Permasalahan ekonomi adalah hal krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Zakat hadir dalam Islam tak hanya untuk mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Tetapi juga menjadi penyambung kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Maka, sebagai

muslim yang baik, kita harus mengetahui dan memahami segala sesuatu mengenai seluk-beluk zakat.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab.Gowa.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih muamalah.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang zakat produktif.
- 2) Bagi akademisi, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat.

- 3) Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat produktif.

F. Garis Besar Isi

Penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yakni:

Bab I adalah bab yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penulisan serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab II adalah bab yang menguraikan tentang tinjauan pustaka diantaranya ialah zakat, zakat produktif, konsep mustahiq, manajemen pengelolaan zakat, dan penyalahgunaan zakat produktif.

Bab III menguraikan tentang metodologi penelitian diantaranya waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian (sejarah Badan Amil Zakat Kab. Gowa, visi dan misi Badan Amil Zakat Kab. Gowa, wilayah hukum Badan Amil Zakat Kab. Gowa, dan struktur organisasi Badan Amil Zakat Kab. Gowa), persentasi muzakki dan mustahiq dalam lingkup Badan Amil Zakat Kab. Gowa, bentuk-bentuk penyalahgunaan mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa, manfaat zakat terhadap muzakki dan mustahiq, analisis zakat menurut hukum Islam, pengelolaan zakat

produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa, dan pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq.

Bab V adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari isi skripsi dan juga beberapa saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan tazkiyah tathhir yang artinya mensucikan. Memakai kata tersebut memiliki dua arti. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹

Selain digunakan untuk nama bagian tertentu dari harta kekayaan dalam praktik penggunaannya, zakat juga berarti proses mengeluarkan harta. Seperti bila kita mendengar seseorang bertanya kepada kita, "apakah anda sudah berzakat?" maksud pertanyaan tersebut adalah apakah kita sudah menyerahkan sejumlah harta kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana diwajibkan Allah swt.²

Zakat menurut bahasa, berarti suci, berkah, bersih, pemberian si kaya kepada si miskin, kewajiban si kaya dan hak si miskin.

¹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, edisi III. (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 3.

² Agus Thayyib Afifi dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), h. 8.

Pengertian zakat menurut syara' (terminologi/istilah), dalam pandangan para ahli fiqh memiliki batasan yang beraneka ragam. Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah “memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.”³

Ulama mengartikan zakat sebagai “hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu.” Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna pemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman.”

Aneka ragam ta'rif di atas hanya berbeda redaksi. Apabila diteliti semuanya mencakup unsur-unsur yang harus ada dalam zakat. Unsur tersebut, yaitu: a) Harta yang dipungut, b) Basis harta dan c) Subjek yang berhak menerima zakat.

Ketiga-tiganya menjadi unsur dalam membentuk struktur definisi zakat. Jadi dapat dikatakan bahwa aneka ragam definisi tersebut saling menyempurnakan satu sama lainnya.

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh

³ Ibrahim 'Usman asy- Sya'lan, *Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi'u al-Ghana'im* (Riyad: t.p., 1402 H), h. 34-35; dikutip dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 26.

berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Artinya aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat.”⁴

Dikatakan bahwa zakat ialah pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah untuk mengurus dan mengendalikannya, mengurus harta pemberian yang diserahkan kepada orang-orang kaya ke tangan yang lain orang yang hidupnya susah payah, dan Allah telah menjadikan harta itu sebagai hak dan rizkinya, yaitu golongan fakir.

Al-Mawardi, mengartikan zakat sama dengan shadaqah dan sebaliknya shadaqah sama juga dengan zakat. Pendapat ini berdasarkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits yang umumnya menggunakan kata shadaqah, sedang yang dimaksud adalah zakat.⁵

Zakat menurut istilah adalah memberikan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada pihak yang telah ditetapkan oleh syara' dengan kadar tertentu.⁶

b. Tujuan Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

⁴ *Ibid*, h. 27

⁵ Al-Mawardi, *Ahkamu al-Sulthaniyyah*, (Kuwait: Dar al-Fikr,tt), h. 113; dikutip dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 28.

⁶ *Ibid.*, h. 28

Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.

Dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya, karena hartanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena didalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan proseduralnya seperti batas nisab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan serta kriteria para mustahiq yang berhak menerimanya.⁷

c. Pengertian Zakat menurut UU RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang tersebut menjelaskan beberapa pengertian tentang zakat dalam pasal 1 yang berbunyi:

⁷ *Ibid.*, h. 42

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.⁸

d. Zakat dalam pandangan hukum Islam

Zakat hukumnya fardhu 'ain bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Adapun al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mewajibkan dan membahas tentang zakat, sampai-sampai ia disejajarkan dengan shalat dalam delapan puluh dua ayat.

⁸ Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat* (Makassar: t.p, 2007), h. 3.

Semakin mempertegas kewajiban zakat di dalam sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwasanya ketika Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal ra ke Yaman beliau bersabda:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ
قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدُمُ أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ،
فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةَ فِي
أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَا نُهُمْ وَتَرَدَّ فِي فَقَرَائِهِمْ
مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, “sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari golongan ahli kitab, maka hendaklah yang pertama engkau serukan kepada mereka adalah beribadah (menyembah) kepada Allah, jika mereka telah mengenal Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka telah melaksanakannya maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka, jika mereka menaatimu perintahmu maka ambillah zakat dari mereka, dan hindarilah harta-harta mulia (harta kesayangan) mereka. Dan takutlah akan do'a orang yang terdzalimi, karena tidak ada penghalang antara do'a tersebut dengan Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim) ¹⁰

⁹ Shahih Bukhari no. 1395 h. 423

¹⁰ Syaikh Husain Bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fikih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Kitab: Zakat, Puasa, Jenazah, dan Haji*, jilid II (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2008), h. 7

Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam Islam. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah saw dan para sahabatnya ra. masih berada di Mekah. Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak.

Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua pasca hijrah. Perintah ini turun setelah diturunkannya kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.

Telah disepakati adanya ijma mengenai wajibnya zakat tidak ada seorang pun yang menyelisihinya sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman kita sekarang.

B. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi.”¹¹

Secara umum produktif (*Productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.”

¹¹ Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford-Erlangga), h. 267. dikutip dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*, (Cet.1; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63.

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.¹²

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

b. Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau

¹² Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah (9) oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Zakat merupakan sarana bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqh yang penerapannya

harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan).

Menurut Ibrahim Hosen, hal demikian adalah agar tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jalbu al-mashalihi al-'ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqh semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil ke depan untuk menjawab segala tantangan zaman.¹³

Teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

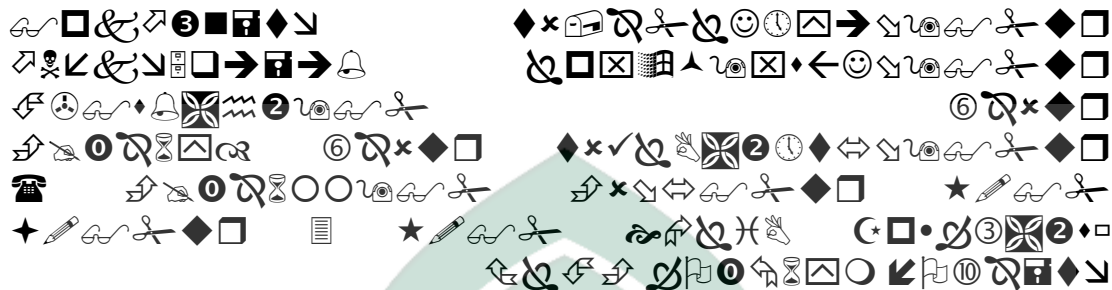
C. Konsep Mustahiq

Mustahiq dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

Di dalam al-Qur'an hak mustahiq menggunakan huruf "*lam lilmilki*" untuk menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak yang berhak. Yaitu pada ayat berikut:



¹³ Ibrahim Hosein, *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Kelompok pemikir masalah-masalah keagamaan Departemen Agama), September 1984, h. 6. dikutip dalam Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam*, (Cet.1; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 79.



Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Berdasarkan ayat ini jelas sekali siapa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutnya delapan asnaf (delapan macam) yaitu:

1. Fakir dan Miskin

Tidak kurang dari sembilan pendapat ulama mengenai fakir dan miskin akan tetapi dianggap dikerucutkan kepada dua pendapat yang dianggap paling kuat. Yaitu fakir lebih payah dari miskin dan sebaliknya.

Al-Faqir itu butuh karena kekurangan. Sebalik dari fakir adalah ganiy (cukup/tidak berkebutuhan) yang pasti ganiy hanyalah Allah swt. Sementara ganiy-nya manusia meskipun kaya akan tetap dalam berkebutuhan. Si kaya butuh kepada si miskin dan sebaliknya. Para ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Syamil, 2007), h. 196.

sekelompok menyatakan bahwa fakir lebih payah kesengsaraannya dari miskin. Sampai mereka menggambarkan bahwa fakir adalah yang tidak memiliki usaha sama sekali bahkan tidak berkemampuan untuk meminta-minta. Sementara miskin masih mampu meminta-minta. Sebaliknya kelompok kedua menyatakan bahwa miskin lebih repot kesengsaraannya dari fakir.

Pada dasarnya haruslah ditemukan perbedaannya, karena dua kata yang disambung dengan huruf “wau” dalam bahasa Arab itu *yaqtadhil mugayarah* (menunjukkan perubahan). Artinya sama tetapi menunjukkan adanya perbedaan.¹⁵

Pendapat mayoritas ulama yang menyatakan fakir lebih payah kemiskinannya dari miskin, maka fakir adalah yang tidak mampu berkasab sama sekali dan miskin masih mampu walaupun hanya dengan meminta-minta. Maka orang fakir lebih miskin dari pada orang miskin.

2. Amil atau Pengurus Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang bekerja di bawah instansi pengelola zakat, seperti para penarik zakat, bendahara, penjaga, sekretaris, penghitung atau pengawas, pendistribusi, dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka ini berhak mendapatkan upah mereka yang diambilkan dari harta zakat.

Pembiayaan ini merupakan bukti yang jelas yang menyatakan bahwasanya zakat dalam Islam bukanlah tugas yang dibebankan pada perasaan dan kehendak pribadi seseorang, melainkan salah satu tugas penting pemerintah Islam yang harus

¹⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq & shadaqah* (Cet. I; Bandung; Tafakur, 2011), h. 192.

mengawasi dan mengatur regulasinya, menghukum orang yang enggan menunaikannya, dan mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya.

Amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kualifikasi yaitu:

- a) Mukallaf, b) Seorang muslim, c) Jujur, d) Memahami hukum zakat dan e) Terampil.

Para ulama fiqih berpendapat, “seorang imam atau pemimpin pemerintahan berkewajiban mengirim para petugas zakat untuk mengumpulkan zakat. Sebab Rasulullah saw dan para Khulafa ar-Rasyidin yang datang setelahnya pernah mengirim para pengumpul zakat untuk menarik harta-harta zakat tanpa terkecuali.”¹⁶ Ini merupakan satu kenyataan yang sudah dikenal dan didengar oleh banyak orang.”¹⁶

3. Muallaf atau Orang yang Dilunakkan Hatinya

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam, dan masih perlu dilunakan hatinya untuk tetap berada dalam keislaman. Atau orang-orang yang ingin dibujuk hatinya agar mempunyai kepedulian terhadap Islam dan meyakinkannya dengan sepenuh hati, atau untuk mencegah sikap buruknya terhadap kaum muslimin, mengharapkan mereka untuk membela atau menolong atas musuh-musuh mereka, dan lain sebagainya, baik mereka ini dari umat Islam maupun non muslim.¹⁷

¹⁶ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat Dalam Empat Madhzhah* (Cet. I; Jakarta; Gadika Pustaka, 2008), h. 60.

¹⁷ Abdurrahim dan Mubarak, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya Bagi Umat* (Cet. I; Jakarta; Surya Handayani, 2002), h.23.

Menurut imam Syafi'i ada empat macam orang yang dilunakkan hatinya:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita beranggapan, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.¹⁸

4. Hamba Sahaya

Hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan mereka berhak mendapatkan pendistribusian zakat untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara:

- a) Membantu budak yang dijanjikan tuannya untuk merdeka dan ia menyetujuinya dengan membayar sejumlah harta. Apabila ia membayarnya, maka ia menjadi bebas dan merdeka.
- b) Hendaknya seseorang membeli hamba sahaya atau budak perempuan dari zakat hartanya, lalu memerdekakannya. Atau bekerjasama dengan orang lain untuk membelinya dan memerdekakannya.¹⁹

¹⁸ Ismail Nawawi, *Zakat dalam perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 71.

Apabila membebaskan seorang muslim dari status hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaan seorang muslim merupakan ibadah, dan diperbolehkan dengan menggunakan harta zakat, maka pembebasannya dari perbudakan atau penghinaan orang kafir tentulah lebih baik dan lebih utama.

5. Gharim atau Orang-orang yang berhutang

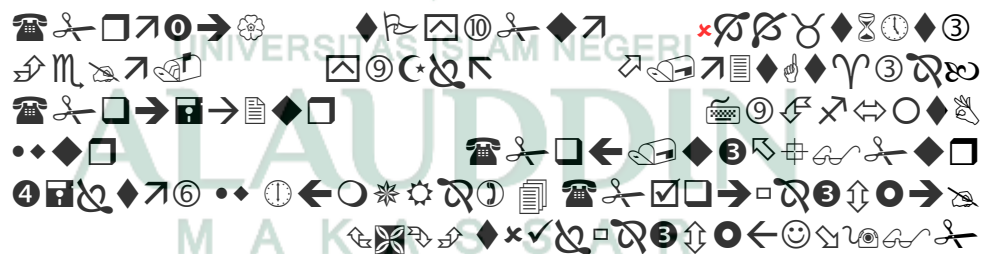
Gharim adalah orang yang mempunyai beban hutang. Kata *al-Garam* mempunyai pengertian dasar *al-Luzum*, yang berarti kebutuhan. Orang yang mempunyai beban hutang disebut gharim karena ia membutuhkan hutang tersebut.

Syarat-syarat pemberian zakat bagi orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi:

- a) Dia memang membutuhkannya untuk membayar hutang tersebut. Apabila ia kaya dan mampu membayar hutangnya dengan uang atau harta benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima zakat. Pengecualian dari harta benda ini adalah tempat tinggal, pakaian, tempat tidur, perabot rumah, pembantu (yang biasa atau akan sulit tanpa pembantu), dan kendaraan. Karena semua itu merupakan kebutuhan pokok manusia, dan hutangnya harus dibayar meskipun ia memilikinya.
- b) Ia berhutang untuk ketaatan atau perkara yang diperbolehkan. Sementara jika ia berhutang untuk kemaksiatan seperti membeli minuman keras, berzina, berjudi, memakai narkoba, dan perkara-perkara yang diharamkan

¹⁹ Syaikh Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim *Ensiklopedi Shaum dan Zakat* (Cet. I; Solo; Cordova Mediatama, 2010), h. 234-235.

lainnya, maka tidak boleh menerima zakat. Dengan alasan bahwa memberikan zakat kepada orang semacam ini sama artinya membantunya dalam menjalankan kemaksiatan terhadap Allah. Akan tetapi, apabila ia mau bertaubat maka boleh menerima zakat. Sebab orang yang bertaubat bagaikan orang yang terlahir tanpa dosa, dengan catatan ada tenggang waktu antara pertaubatannya dengan pemberian zakat sehingga bisa dinilai bahwa ia telah menjadi baik dan istiqamah. Orang yang berhutang untuk membeli barang-barang yang diperbolehkan untuk membelinya namun secara berlebihan. Berhutang untuk membeli barang-barang yang diperbolehkan namun secara berlebihan (mubadzir) bagi seorang muslim hukumnya adalah haram.²⁰ Berdasarkan firman Allah,



Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 235-236.

²¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 154

- c) Hutang tersebut mengharuskan (deadline) pembayaran saat itu juga berdasarkan Ijma'. Bila pembayaran hutang tersebut bisa ditunda, maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat.
- d) Orang yang mendamaikan golongan atau kelompok yang berseleisih maka ia boleh meminta zakat untuk pembayaran hutangnya, guna mendamaikan mereka yang berselisih.²²

6. Fi Sabilillah atau untuk jalan Allah

Fi sabilillah adalah perang dan kegiatan orang-orang yang berjihad. Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, sarana dan prasarana kajian ilmu agama, aktifitas agama yang membelanjakan waktu dan energinya untuk Islam dan keilmuan Islam, pemakmuran mesjid, biaya haji dan umrah, belajar agama untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin dakwah islamiyyah.²³

Dikalangan para ulama baik yang klasik maupun yang kontemporer ada yang memperluas cakupan pengertian kata *Fi Sabilillah*. Mereka tidak membatasi pengertiannya pada peperangan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, akan tetapi menafsirkannya secara lebih luas meliputi semua kepentingan dan bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah, bakti-bakti sosial, dan kebijakan sesuai dengan cakupan pengertian kata *Fi sabilillah* dan artinya secara umum.

²² M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 163

²³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *op. cit.*, h. 200.

7. Ibnu Sabil atau Orang yang sedang dalam Perjalanan

Ibnu sabil adalah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan kekayaannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang bermaksiat kepada Allah swt. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan tidak didapatkan pendapat yang berbeda.

Berikut ini beberapa kriteria ibnu sabil yang berhak menerima zakat:

- a) Ia membutuhkannya pada saat itu, yang dengan pemberian tersebut dapat mengantarkannya ke tempat tujuannya. Apabila ia mempunyai perbekalan yang cukup, yang dapat menghantarnya kembali ke tempat tujuannya maka tidak berhak menerima zakat.²⁴
- b) Kepergiannya bukan untuk kemaksiatan. Orang yang bepergian untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, mencari rejeki, berwisata (dengan tujuan baik), atau yang lain. Jika kepergiannya untuk berbuat maksiat, seperti melakukan pembunuhan, memperdagangkan barang-barang haram dan lain-lain. Maka ia tidak berhak menerima zakat sama sekali, kecuali mau bertaubat dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.²⁵
- c) Ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman kepadanya pada saat itu, dengan keadaannya tersebut.

²⁴ Syaikh Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *op. cit.*, h. 240.

²⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, *loc. cit.*

D. Menejemen Pengelolaan Zakat

a. Manajemen Zakat Sebuah Konsep

Keberadaan manajemen karena adanya tuntutan pengaturan dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan negara menjalankan fungsi dan tanggung jawab terhadap rakyat dan aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Menurut Hafidhuddin dan Henri Tanjung mengatakan, apabila kita membicarakan manajemen, maka perlu kita menyadari bahwa manajemen telah begitu ada dalam kehidupan ini.²⁶

Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi sosial dan lainnya. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya dan material kearah tercapainya tujuan. Kast dan James. E. Rosenzweig mengemukakan daripada mencoba memberikan sebuah definisi sederhana dalam satu kalimat mengenai manajemen, kami lebih suka memakai uraian yang lebih komprehensif memadukan berbagai pandangan dalam suatu konteks sistem. Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah sub sistem kunci dalam sistem organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub sistem lainnya.²⁷

²⁶ Hafidhuddin dan Henri, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2003) h. 19; dikutip dalam Ismail Nawawi, *Zaka dalam Perspektif Fiqh, Sosial& Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 45.

²⁷ Kast dan James. E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 6-7; dikutip dalam Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial& Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 46.

Manajemen mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan sumber daya manusia, material dan keuangan kearah tercapainya organisasi secara efektif dan efisien.
2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat
3. Mengembangkan iklim organisasi dimana orang dapat mengejar sasaran perseorangan (*individual*) dan sasaran bersama (*collective*)
4. Melaksanakan fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi
5. Melaksanakan berbagai peranan antar pribadi informasional dan memutuskan.²⁸

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kathryn M. Bartol dan David C. Martin dikemukakan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama, yaitu: perencanaan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), memimpin pelaksanaan kegiatan (*leading/actuating*) dan pengawasan/mengendalikan (*controlling*).²⁹

Dikatakan bahwa manajemen adalah merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan. Manajemen adalah sebuah ilmu, seni, profesi, proses dan sistem

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Prinhallindo, 2001) h. 9; dikutip dalam Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 46-47.

yang mengubah berbagai sumber daya (manusia, material, mesin, metoda, uang, waktu, informasi, pasar dan moral) dalam suatu ruang usaha yang berguna bagi kemanusiaan serta untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain secara sistematis efektif, efisien, dan rasional. Sehubungan dengan manusia melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan secara profesional dan rasional banyak usaha untuk mengklasifikasikan manajemen sebuah profesi.

Hal ini sebagian dapat diklasifikasikan menurut karakteristiknya sebagai berikut:

1. Para manajer profesional membuat perencanaan dan keputusan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan atas dasar prinsip-prinsip umum. Adanya pendidikan, kursus-kursus dan program-program latihan formal menunjukkan bahwa adanya prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan.
2. Para manajer profesional mendapatkan status mereka karena mencapai standar prestasi kerja tertentu, bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agama dan kriteria politik atau sosial lainnya
3. Para manajer profesional harus ditentukan oleh kode etik yang kuat dengan untuk mereka yang menjadi kliennya.³⁰

Berkaitan dengan manajemen zakat dengan kerangka pemikiran sebagaimana di atas harus berpedoman dengan prinsip-prinsip dasar manajemen secara profesional sebagaimana penerapan ketentuan-ketentuan atau prinsip dan fungsi manajemen

³⁰ Ismail Nawawi, *op. cit.*, h. 47.

secara umum tersebut. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dijelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang berkaitan dengan zakat.

b. Perencanaan Zakat

Dalam memanajemeni zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Dalam kata-kata hikmah disebutkan “*Al Insanu at tafkir wallahu bil taqdir*” (manusia yang memikirkan dan Allah lah yang menentukan). Yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw:

وروى أحمد مرفوعا والطبراني وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس من أصحابه وهم يتفكرون في خلق الله، فقال لهم فيما كنتم تتفكرون؟ قالوا

الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاور السماء العليا، من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عام، وما بين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام، والخالق أعظم، وأسانيدها ضعيفة، ولكن اجتماعها يكسبه قوة ومعناه صحيح، تعليقاتكم يا أهل الحديث أي من هذه الروايات يصح نسبته للنبي أم لا يصح منها شيء؟ أم هي من كلام بن عباس؟ وإن لم تكن صحيحة فهل هي ضعيفة أم موضوعه مكذوبه لأن هذا الحديث فيه كلام كثير؟؟

Artinya:

Dan Ahmad dan Tabrani dan membawa Abu Naim Abdullah bin Salam mengatakan, Rasulullah saw pada orang-orang dari teman-temannya saat mereka memikirkan tentang penciptaan Allah, berkata kepada mereka, karena mereka memikirkan? Mereka merenungkan ciptaan Tuhan, dan dia mengatakan tidak memikirkan Allah, dan memikirkan ciptaan Allah, Tuhan menciptakan seorang raja kakinya di bumi ketujuh mungkin lebih rendah dan kepala langit tinggi, dari antara kakinya ke mata kaki di dalam derap-enam ratus tahun, dan antara mata kaki dengan telapak kakinya berbaris enam ratus tahun, dan Sang Pencipta terbesar, dan yang lemah berbicara, tetapi kekuatan pendapatan dan

³¹ Imam al Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Jilid 4*, hal. 450

maknanya benar, pendapat mereka berbicara salah satu cerita adalah tingkat sebenarnya dari Nabi atau tidak sesuatu itu benar dari mereka? Atau itu kata-kata Ibnu Abbas? Dan yang tidak benar itu lemah atau palsu karena tema ini berbicara banyak berbicara?³²

Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan / lembaga amil zakat. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisir.

Terkait dengan perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang yang berhak mendapatkan zakat (*mustahiq*). Sedangkan tujuan adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat.

³² Al' Allamah Almarhum Asy Syaikh dan Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu'min* (Bandung : C.V. Diponegoro, 1975) h. 1009.

3. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat.

Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat (*muzakki*) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Setelah diidentifikasi kemudian orang-orang tersebut dikompilasikan dengan data khusus, sehingga teridentifikasi secara tertib dan rapi, sebagai bahan pembuatan program kerja dalam pengelolaan zakat.

4. Menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.

5. Menetapkan *amil* atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang mempunyai komitmen, kompetensi, *mindset* dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat.

6. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pengelolaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus secara berkesinambungan.³³

Dari perencanaan tersebut, kemudian dibuatlah program kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kelembagaan zakat yang telah ditetapkan. Tugas utama dalam merancang bangun kegiatan zakat harus disesuaikan dengan lingkungan kerjanya agar dapat membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan dilakukan secara rasional.

³³ Ismail Nawawi, *op. cit.*, h.48.

c. Cara membayar zakat mal / harta kekayaan

- Niat menunaikan / membayar zakat

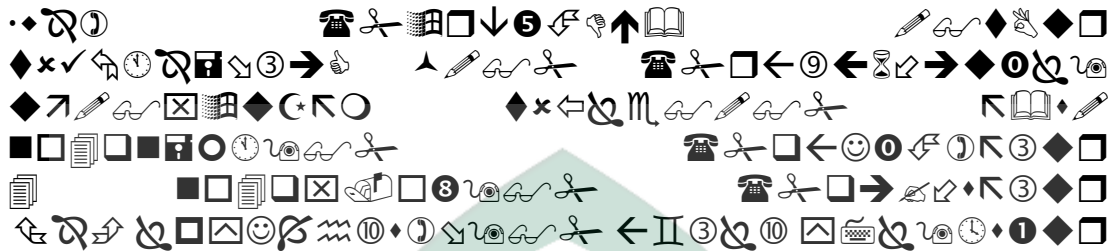
Zakat sebagai bentuk ibadah sah karena disertai niat. Oleh karena itu ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat. Sebagian ulama mendefinisikan niat artinya menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai (beriringan) dengan perbuatannya. Ada juga yang mendefinisikan niat adalah keinginan yang ditujukan untuk mengerjakan suatu perbuatan sambil mengharapkan ridha Allah SWT dan menjalankan hukumnya.

Disepakati bahwa tempat niat adalah dalam hati dan dilakukan pada permulaan melakukan perbuatan untuk tujuan amal kebaikan.

Para ulama telah sepakat bahwa niat sangat penting dalam menentukan sahnya suatu ibadah. Niat termasuk rukun pertama dalam setiap melakukan ibadah. Tidaklah suatu ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, bila dilakukan tanpa niat atau dengan niat yang salah.

- Menunaikan / membayar zakat dengan ikhlas dan menjauhi Riya

Niat dalam arti motivasi, juga sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu amal oleh Allah SWT. Zakat umpamanya, dianggap sah menurut pandangan syara' karena memenuhi berbagai syarat dan rukunnya, belum tentu diterima dan berpahala kalau motivasinya bukan karena Allah, tetapi karena manusia, seperti ingin dikatakan dermawan, rajin, tekun, dan sebagainya. Motivasi dalam melaksanakan setiap amal harus betul ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah saja, sebagaimana firman Allah SWT:



Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (QS. Al Bayyinah: 5)³⁴

Kebalikan atau lawan kata ikhlas adalah riya. Riya artinya melakukan ibadah karena malu kepada manusia atau supaya dilihat orang. Oleh karena itu dalam menunaikan zakat harus menjauhi perbuatan riya agar mendapat pahala dan diterima ibadah kita oleh Allah SWT.

Adapun yang dimaksud ikhlas menurut Sayid Sabiq dalam buku Islamuna adalah sebagai berikut:

“Ikhlas adalah sikap manusia untuk menyengaja dengan perkataan, perbuatan dan jihadnya, karena Allah semata dan karena mengharapkan keridhaanNya. Bukan karena mengharapkan harta, pujian gelar (sebutan), kemasyhuran dan kemajuan. Amalnya terangkat dari kekurangan-kekurangan dan dari akhlak yang tercela sehingga ia menemukan kesukaan Allah”.³⁵

Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menerangkan kerugian orang-orang yang suka riya dalam beramal. Bahkan dengan tegas ditanyakan bahwa orang yang riya akan celaka walaupun ia rajin beribadah. Sebagaimana Allah berfirman Q.S. Al-Maa'un ayat 4-7 yang berbunyi:

³⁴ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 598.

³⁵ Abd. Rahim dan Mubarak, *op. cit.*, h.72.



Terjemahnya:

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, Orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Q.S. al-Maa'un 4-7)³⁶

Kita tidak boleh membuat enggan melakukan amal ibadah karena takut termasuk orang yang riya dan amalnya menjadi sia-sia.

Orang yang takut kehinaan dan kesalahan sehingga tidak mau berbuat apa-apa sesungguhnya ia telah hina dan berbuat kesalahan. Begitu pula orang yang tidak mau beribadah karena takut dikatakan riya sesungguhnya ia termasuk orang yang riya. Sebaliknya, tetaplah beramal sambil memohon ampun atas riyanya, dengan harapan Allah SWT memberi taufik dalam amal-amal yang lain. Dikatakan bahwa dunia menjadi sepi akibat matinya orang-orang yang riya. Namun keramaian dunia karena ulah mereka dalam membangun pondok-pondok pesantren, madrasah, masjid, dan lain-lain yang menjadi kepentingan umum, sekalipun amal itu riya, berkat do'a setiap orang Islam yang ikhlas, semua itu bermanfaat juga baginya.

- Menunaikan/membayar zakat tepat waktu

Mengerjakan ibadah jangan keluar dari waktu, artinya melakukan ibadah dalam waktu tertentu, sedapat mungkin dikerjakan di awal waktu (tepat waktu). Ibadah shalat, puasa, haji harus pada waktunya yang telah ditentukan oleh agama.

³⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 602

Shalat dikerjakan diawal waktu lebih baik daripada ditengah atau diakhir waktu. Apalagi puasa wajib / puasa ramadhan harus dikerjakan pada bulan ramadhan dan haji harus dilaksanakan pada bulan haji / Dzulhijjah. Demikian juga ibadah zakat harus ditunaikan sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan oleh agama.³⁷

Seorang petani harus mengeluarkan zakatnya apabila selesai panennya, dan tidak menunggu sampai 1 tahun. Seorang pengusaha atau pedagang harus mengeluarkan zakatnya apabila waktu usahanya/berdagangnya sudah 1 tahun. Jangan menunggu sampai beberapa tahun.

Begitu juga zakat profesi yang berupa penghasilan/pendapatan dari gaji atau uang komisi dan lain-lain. Kalau sudah mencapai haul/satu tahun lamanya, harus mulai dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai tertunda-tunda yang pada akhirnya jatuh miskin.

Membayar zakat sebelum waktunya asal diperkirakan, dalam satu tahun mencapai nisabnya adalah boleh menurut sebagian ulama, misalnya setiap 1 bulan sekali. Jadi tidak mesti tiap tahun, tetapi dicicil juga boleh, asal diperkirakan bahwa dalam satu tahun itu hartanya mencapai nisab (batas minimal harta yang terkena wajib zakat)

- Membayar zakat pada lembaga zakat yang dapat dipercaya atau secara langsung

Membayar zakat bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kita membayar zakat tanpa

³⁷ *Ibid.*, h. 74.

perantara, tetapi langsung kepada 8 golongan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Secara tidak langsung maksudnya membayar zakat melalui lembaga zakat seperti BAZIS atau melalui orang-orang yang mengelola zakat (menerima dan menyalurkannya) dan orang-orang itu kita sudah mengenal tentang kepribadian dan kejujurannya.

Berkaitan dengan cara pembayaran zakat ini, maka harta-harta yang wajib dizakati itu terbagi dua bagian, yaitu harta bathin (emas dan perak, barang dagangan dan rikaz) dan harta zahir (hewan ternak, tanaman, buah-buahan dan hasil tambang).

Pemilik harta bathin yang telah memenuhi syarat wajib zakat dapat membayar zakatnya dengan cara (a) menyerahkan sendiri zakatnya kepada mustahiq zakat, (b) mewakilkan seseorang untuk menyampaikannya dan (c) menyerahkannya kepada pemerintah atau petugas yang ditunjuknya untuk amil zakat.

Bila pemerintah dan petugas zakat itu adil, maka cara ketiga lebih baik, karena harta zakat dapat tersalurkan sebagaimana mestinya. Tetapi, bila pemerintah dan petugas zakat tidak adil, maka harta itu lebih baik diserahkan sendiri kepada mustahiqnya.

Adapun harta zahir, sebaiknya diserahkan kepada amil yang ditugaskan pemerintah, karena pemerintah berhak menuntut agar para wajib zakat benar-benar membayar zakat mereka dari jenis harta zahir itu. Dalam hal ini, pemerintah wajib mengutus para petugas untuk mengutip zakat sebagaimana dilakukan Rasulullah dan para khalifahnyanya. Disyaratkan para petugas zakat itu adil, terpercaya, dan faqih,

menguasai hukum-hukum tentang berbagai masalah zakat agar dapat menjelaskan tugasnya secara benar.³⁸

Para petugas yang mengutip zakat ternak sebaiknya diutus pada bulan Muharram, yang oleh Usman disebut zakat, sedangkan petugas zakat hasil bumi diutus pada masa panennya masing-masing. Bila tidak ada amil yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengutip zakat, pemilik zakat harta wajib menyerahkan zakatnya kepada para mustahiqnya.³⁹

Dasar hukum dibolehkannya membayar zakat kepada lembaga/badan zakat, pemungut zakat dan orang-orang yang memegang Yayasan Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An Nisaa ayat 59:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu...”⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mentaati Allah, mentaati Rasul-Nya dan penguasa dari kaum muslim.

³⁸ Abd. Rahim dan Mubarak, *op. cit.*, h. 75.

³⁹ Abd. Rahim dan Mubarak, *op. cit.*, h. 76.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 87.

Kewajiban menyerahkan zakat kepada pemerintah atau lembaga zakat (BAZIS) apabila pemerintah memintanya adalah selagi penyalurannya terbuka dan tepat sasaran. Tetapi kalau ada indikasi menyimpang maka lebih baik membayar zakat secara langsung atau melalui Yayasan keagamaan dan sosial yang pimpinan atau panitianya kita kenal, atau melalui lembaga amil zakat (LAZ) yang penyalurannya bisa kita baca di majalah. Atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dan pondok pesantren.

E. Penyalahgunaan Zakat Produktif yang dilakukan oleh Mustahiq

Penyalahgunaan adalah suatu benda atau barang yang tidak pada tempat penggunaannya. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴¹

Penyalahgunaan zakat produktif sering terjadi dikalangan mustahiq. Dana zakat yang diberikan oleh BAZ kepada para mustahiq sering kali menyalahi prosedur yang diberikan BAZ kepada mustahiq. Modal usaha yang diberikan kepada mustahiq sebagian besar mustahiq tidak memanfaatkannya secara baik.

⁴¹ Asnaini, *op. cit.*, h. 64.

Modal usaha yang diberikan oleh mustahiq yaitu modal yang berupa pinjaman yang dibayar secara berangsur-angsur. Untuk memudahkan pengembalian tersebut maka mustahiq dibagi perkelompok. Jumlah mustahiq setiap kelompoknya berjumlah lima orang dan bisa lebih disesuaikan dengan kondisinya. Salah satu dari anggota kelompok inilah yang membuat terhambatnya pengembalian modal tersebut. Sehingga anggota kelompok yang lain sangat sulit untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Biaya angsuran kelompok mustahiq yang tidak terbayarkan akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompoknya itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan biaya lanjutan dari Badan Amil Zakat setempat. Biaya lanjutan dalam artian setelah mereka lunasi modal yang telah diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BAZ maka kelompok mustahiq masih dapat diberikan modal usaha sesuai dengan ketentuannya.

Kelompok mustahiq yang tidak dapat mengembalikan modal secara utuh atau tidak dapat melunasi secara keseluruhan modal yang telah diberikan. Yang diakibatkan salah satu anggotanya telah menyalahgunakan dana tersebut sehingga pengembalian modal terhambat. Pengurus Badan Amil Zakat sudah tidak memberikannya lagi modal kepada anggota mustahiq yang menyalahgunakannya.

Anggota mustahiq yang tidak menyalahgunakan dana zakat produktif masih dapat melanjutkan usahanya dengan syarat mereka tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus BAZ baik itu di provinsi, kabupaten, maupun

kecamatan. Sampai saat ini, para pelaku penyalahgunaan zakat produktif belum ada yang diproses ke pengadilan ataupun kejaksaan.

Akibat dari penyalahgunaan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq akan menghambat pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dimana menjadi salah satu tujuan utama BAZ. Tidak hanya itu, melainkan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran dikarenakan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh mustahiq. Apabila terjadi penyalahgunaan maka pengurus BAZ tidak bisa menindak lanjutinya dikarenakan belum ada payung hukum untuk menyeret para pelaku ke pengadilan dan kekuatan undang-undang yang masih lemah. Tindakan yang dilakukan pengurus BAZ dengan memberhentikannya sebagai mustahiq dan menjadikannya masyarakat yang mampu.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dikalangan mustahiq yaitu kurangnya pemahaman mustahiq tentang zakat produktif. Pemahaman yang timbul dikalangan mustahiq adalah menganggap zakat yang telah diberikan kepadanya adalah zakat untuk fakir miskin yang tidak dikembalikan lagi.

Tidak adanya pengembalian dari mustahiq maka dana untuk zakat produktif yang ada di Badan Amil Zakat tersebut itu akan semakin berkurang. Dan semakin berkurangnya dana akan semakin sulit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pada saat laporan keuangan pengurus Badan Amil Zakat kepada para muzakki bahwa ternyata zakat yang mereka berikan kepada mustahiq itu disalahgunakan maka tingkat kepercayaan para muzakki akan menurun. Dan semakin menurunnya tingkat kepercayaan muzakki maka semakin berkurang muzakki yang

menyetor dana zakatnya di Badan Amil Zakat. Tidak menutup kemungkinan BAZ akan mengalami penurunan dan bisa jadi organisasi yang dibentuk oleh pemerintah ini akan mati.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran tentang cara penelitian ini dilaksanakan dalam bagian ini dijelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

A. Waktu dan tempat penelitian

1. Waktu penelitian

Penelitian di Kementerian Agama Kab. Gowa dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober s/d 21 November 2011

2. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kab. Gowa yang bertempat di jalan Agussalim no.3 Kelurahan Bonto-bonto Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena letaknya yang tidak jauh dari kediaman penulis yang memudahkan dalam mengumpulkan data-data dan berbagai informasi mengenai skripsi tersebut.

B. Jenis penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan naskah skripsi ini, ditinjau dari penarikan sampel dan sesuai dengan sifat permasalahan dan objek kajian maka penelitian ini adalah jenis penelitian *survei* yakni penelitian yang dilakukan pada populasi tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Penggunaan metode ini dimaksudkan penulis akan memberikan gambaran secara umum penyalahgunaan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq kepada Badan Amil Zakat Kab. Gowa kemudian menjelaskan bentuk-bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh mustahiq serta manfaat zakat terhadap muzakki dan mustahiq dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, maka mencakup semua elemen yang terdapat dalam wilayah penelitian. Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹ Muhamad juga mengemukakan bahwa populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi 6. (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 130

yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan.²

Bedasarkan pengertian tersebut maka populasi dari penelitian ini adalah mustahiq dan pegawai Badan Amil Zakat Kab. Gowa karena jumlahnya sebanyak 100 orang maka penulis mengambil sampel. Menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

Dari pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel adalah mustahiq yang mewakili keseluruhan di Kab. Gowa maka penulis mengambil sampel 50 orang dari 5 kecamatan yang terdiri dari 10 orang setiap kecamatan yakni kecamatan Somba Opu, Barombong, Manuju, Tombolopao, dan Biringbulu, pegawai dan pengurus BAZDA Kab. Gowa yang berkaitan mengenai judul skripsi penulis, dalam hal ini staf umum sebagai tempat pengambilan data yang akan diolah, pengurus yang menangani dan paham tentang penyalahgunaan zakat produktif.

² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, edisi 1. (Cet I; jakarta: rajawali pers, 2008), h.161.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dijangin melalui penelitian lapangan dan dokumentasi yang sangat erat kaitannya dengan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan.

1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu cara pengumpulan data dengan cara membaca dan menelusuri sejumlah literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, dimana penulis menggunakan beberapa cara:
 - a. Kutipan Langsung, yaitu penulis mengutip secara langsung pendapat-pendapat yang relevan dengan pembahasan skripsi ini tanpa mengubah redaksi isi maknanya.
 - b. Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip suatu pendapat dengan merubah redaksi, ulasan, dan uraian-uraian sehingga terdapat perbedaan dengan aslinya namun maksud dan tujuannya sama.
2. *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penulis mengadakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data konkrit yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Dalam pengumpulan data di lapangan lewat metode ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a. Metode observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan secara sistematis, yaitu dengan jalan menemukan faktor-faktor yang akan

diteliti beserta kategorinya, berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.

Dalam hal ini menyangkut penyalahgunaan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq kepada Badan Amil Zakat Kab. Gowa.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara. Pedoman wawancara ini, dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarai. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dan mustahiq selama observasi.

c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini data-data diambil dari kantor Badan Amil Zakat Kab. Gowa

E. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan tiga macam. Sebab data yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, karenanya untuk mencapai apa yang diinginkan, maka penulis mengolah data yang selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan dalam skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan dalam pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Metode induktif, menganalisa data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu penganalisaan data yang didasarkan dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yaitu setiap data yang bersifat khusus dan bersifat umum, selanjutnya dibandingkan antara keduanya, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Sejarah Singkat BAZ

Pada tahun 1967 KH. Saifudin Zuhri selaku Menteri Agama RI mengajukan draf Undang-undang Zakat kepada DPR RI yang pada saat itu di ketuai oleh A.H. Nasution, akan tetapi langkah tersebut tidak ada tindak lanjut, yang akhirnya pada tahun 1968 Menteri agama RI di orde Baru KH.Moh.Dachlan mengeluarkan dua peraturan tentang Zakat yaitu Peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal.

Kedua Peraturan itu dilengkapi dengan Intruksi Menteri Agama No.16 tahun 1968 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penjelasan Mengenai Peraturan Menteri Agama No.4 dan No.5 tahun 1968.

Dengan pelaksanaan syariat Islam pada saat itu, ternyata banyak yang alergi sehingga Presiden Suharto tidak menyetujui langkah Menteri Agama tersebut yang disampaikan pada saat Peringatan Isra dan Mi'raj pada tanggal 28 Oktober 1968, sehingga kebijakan Menteri agama pada saat itu ditangguhkan dan ditunda pelaksanaannya.

Penundaan tersebut dituangkan dalam Intruksi Menteri Agama RI No.1 tahun 1969 tentang penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri No. 4 dan 5 tahun 1968.

Setelahnya kebijakan Menteri Agama RI ditangguhkan, maka dengan sepakat daerah-daerah mengambil prakarsa sendiri-sendiri membentuk Badan Amil Zakat seperti yang dilakukan oleh DKI saat itu dengan BAZIS nya di Jawa Timur dengan BAZ nya di selawesi Selatan membentuk BAMILZA dan di Aceh dibentuk BHA (Badan Harta Agama), pembinaan Badan Amil Zakat didaerah tersebut dibawah Departemen Agama dan Dirjen Bimas Islam dengan mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan zakat sebanyak 9 seri.

Dalam kurun waktu 10 tahun Badan Amil Zakat yang telah dibentuk dimasing-masing daerah belum nampak hasilnya, sehingga dizaman Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Perwiranegara sekitar tahun 1978-1983 digagaslah gerakan untuk mengumpulkan dana Umat melalui kegiatan amal jariyah dengan menyiapkan konsep pembentukan Yayasan Amal Jariyah yang pendirinya terdiri dari para menteri yang beragama Islam.

Setelahnya pembentukan yayasan tersebut dilaporkan ke Presiden dan disetujui yang kemudian direalisir melalui akte Notaris Soeleman Ardjasmita No.29 tanggal 17 Pebruari 1982 dan namanya diubah menjadi Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila yang susunan kepengurusannya terdiri satu orang ketua 5 orang wakil ketua 3 orang sekretaris, 2 orang bendahara dan 34 orang anggota. Adapun Pengurus Harian pada saat itu adalah :

Ketua : Soeharto

Wakil Ketua 1 : H.Alamsyah Ratu Perwiranegara

Wakil Ketua II : Prof.Dr.Widjojo Nitisastro

Wakil Ketua III : H.Amir Machmud

Wakil Ketua IV : KH.Tohir Widjaja

Wakil Ketua V : Drs.H.TH.Gobel

Sekretaris I : Sudharmono, SH

Sekretaris II : KH.E.Z. Muttaqin

Sekretaris III : Ir.Drs.H. Ginanjar Kartasasmita

Bendahara I : H. Bustanil Arifin, SH

Bendahara II : H. Soekasah Somawidjaja.¹

Pada tahun 1991 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.29 tahun 1991 dan No.47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, dengan tujuan agar pengelolaan Zakat oleh BAZIS dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasil guna.

Namun untuk pelaksanaan BAZIS Nasional pada saat itu ditentang oleh Dirjen Politik Departemen Dalam Negeri yaitu Drs. Hari Sugiman, menurutnya pengelolaan zakat cukup di daerah saja dan dianggap sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), namun setelah diadakan Mudzakah Nasional tentang Zakat yang diadakan di Jakarta pada bulan Maret 1992 yang diikuti pengurus BAZIS

¹ “Badan Amil Zakat,” *Situs Resmi Badan Amil Zakat Bogor*.
<http://www.bazkotabogor.or.id/index.php/baz/sejarahbaz> (23 November).

daerah dan para ulama seluruh provinsi seluruh Indonesia mengusulkan pembentukan BAZIS Nasional, yang akhirnya usulan tersebut diterima oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada saat itu adalah KH. Munawir Syadzali, MA dan H. Rudini dan berjanji untuk meneruskan usul tersebut ke Presiden RI.

Hasil Mudzakah tersebut oleh Bimas Islam disampaikan juga kepada seluruh instansi pemerintah di tingkat nasional tentang pembentukan BAZIS Nasional.

Usulan pembentukan BAZIS Nasional itu ternyata tidak disetujui oleh Presiden RI, sedangkan UPZ di sementara instansi tingkat nasional sudah berjalan terutama di BUMN-BUMN dan beberapa instansi lainnya dengan nama yang berbeda-beda bahkan ada yang menyalurkan zakatnya sesuai dengan selera masing-masing.

Selain di instansi-instansi pemerintah lembaga pengelola zakat juga kemudian didirikan oleh lembaga lain seperti Dompot Dhuafa yang didirikan oleh pengurus harian Republika pada tahun 1993, sementara itu beberapa ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah juga telah mempunyai lembaga pengelola zakat sendiri. Pengurus Lembaga Pengelola Zakat tersebut kemudian berhimpun dalam suatu asosiasi yang disebut dengan FORUM ZAKAT (FOZ).

Proses keluarnya UU Zakat setelah mendapatkan penolakan dibentuknya BAZIS Nasional oleh Presiden RI (Soeharto) kemudian Menteri Agama H. Tarmizi Taher bersama departemen Agama mempersiapkan kembali Draft Undang-undang

Zakat dan oleh Menteri Agama disarankan untuk menunggu keluarnya GBHN hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1998.

Setelah Sidang MPR RI ternyata yang tercantum dalam GBHN adalah mempersiapkan Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji, setelah menjadi RUU Haji kemudian dibahas dalam sidang pleno DPR RI kemudian disahkan dan ditanda tangani oleh Presiden B.J.Habiebie menjadi Undang-undang no. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji tanggal 3 mei 1999. Setelah itu dipersiapkannya draf Undang-Undang Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan disetujui oleh Menteri Agama Malik Fajar, M.Sc pada tanggal 4 februari 1999.

Sambil menunggu persetujuan Presiden RI maka dibentuklah panitia interdep yang terdiri dari unsur Depag, Depdagri, Depsos, Depkeu, Dep Kehakiman, MUI dan IAIN untuk membuat draft RUU tentang Pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan selesai pada bulan april 1999, kemudian diubah menjadi draft undang-undang pengelolaan zakat kemudian disetujui oleh presiden melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung No.B-283/M,Sekneg/4/1999 tanggal 30 April 1999 dan diterima pada tanggal 20 mei 1999.

RUU tentang Pengelolaan Zakat tersebut kemudian disampaikan oleh presiden B.J.Habibi ke DPR RI pada tanggal 24 Juni 1999 No.R.31/PU/V1/1999, akan tetapi masa sidang hasil Pemilu tahun 1997 tinggal sedikit maka menunggu hasil pemilu juli 1999.

Setelahnya hasil pemilu juli 1999 maka dibahaslah kembali tentang draft RUU pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh dengan melalui beberapa persidangan di DPR RI dan akhirnya pada tanggal 14 september 1999 keputusan DPR RI kepada Presiden dengan nomor surat RU.01/3529/DPR-RI/1999. Hanya dalam waktu seminggu tepatnya tanggal 23 september 1999 RUU tentang pengelolaan Zakat akhirnya ditanda tangani dan disahkan oleh Presiden B.J.Habibie menjadi Undang-Undang (UU).

Pelaksanaan Undang-Undang Zakat

1) Peraturan Pelaksanaan

Setelahnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.38 tahun 1999 diterbitkan, maka harus didukung dengan Peraturan Pemerintah atau ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah, mengingat situasi politik pada saat itu, maka disepakati untuk lebih lanjut dibuat keputusan Menteri, maka keluarlah Keputusan menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

2) Organisasi Pengelola Zakat

Sesuai dengan peraturan bahwa pengelolaan zakat seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang diangkat atau dibentuk oleh pemerintah berdasarkan firman Allah Swt yang tercantum dalam surat At-taubah ayat 103. Begitu juga pada zaman Nabi petugas Zakat di angkat oleh Nabi Muhammad SAW begitu pula dizaman para khulafaurrosyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Hanya di negara-negara sekuler pengelola Zakat diangkat oleh masyarakat islam setempat.

Seperti contoh di Singapura yang merupakan negara sekuler petugas zakat diangkat oleh Majelis Ulama Islam Singapura. Didalam peraturan Menteri Agama No.4 tahun 1968 andaikata tidak dihentikan pelaksanaan pengelola zakat hanya dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah. Dan dibentuk hanya di Desa dan kecamatan sedang di kabupaten, kota/propinsi dan pusat berdasarkan peraturan Menteri Agama no.05 tahun 1968 dibentuk Baitulmal.

- 3) Pengumpulan Zakat
- 4) Pendayagunaan Zakat
- 5) Kaitan Zakat dengan Pajak

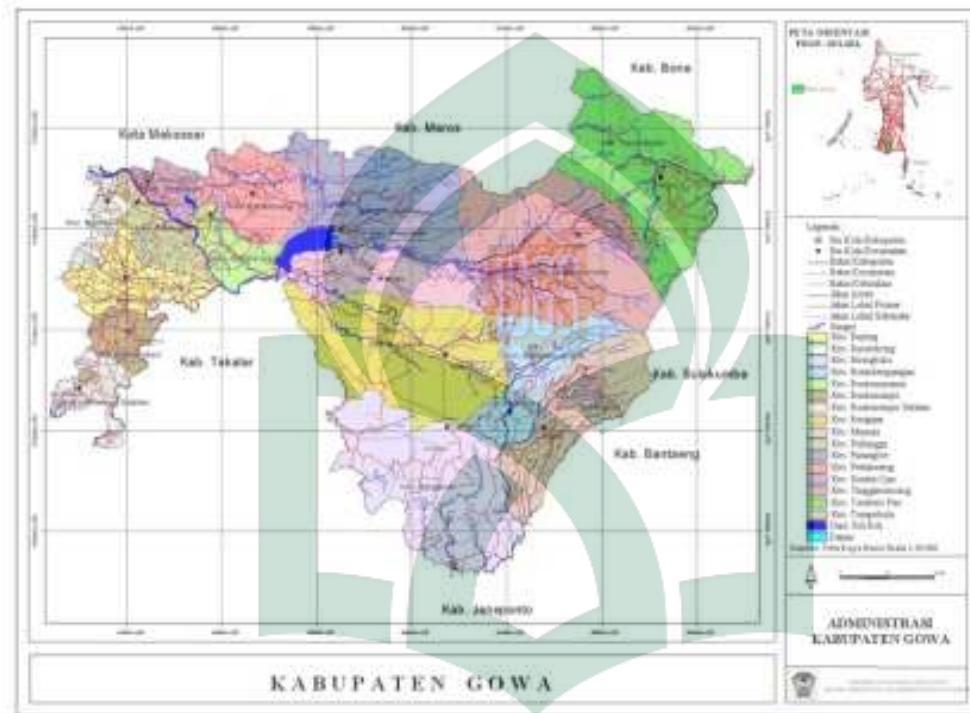
Visi dan Misi Badan Amil Zakat Kab. Gowa

Visi : Terkelolanya zakat yang lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Misi :

1. Meningkatkan keterampilan pengelola zakat agar lebih berwawasan luas tentang perzakatan.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi perzakatan.
3. Meningkatkan motivasi, pemahaman dan kesadaran kepada umat Islam lewat media dan wadah informai yang ada.
4. Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang amanah dan profesional
5. Mengembangkan potensi zakat.
6. Meningkatkan pendistribusian zakat kepada para mustahiq.
7. Meningkatnya aktualisasi pendayagunaan zakat pada kehidupan umat Islam khususnya di Kab. Gowa.
8. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan zakat sesuai kebutuhan.

Wilayah pengumpulan dan pendistribusian dana zakat BAZ Kab. Gowa



Sumber: Gowa tahun 2009

- J Luas wilayah kerja Badan Amil Zakat Daerah Kab. Gowa yang terdiri dari 18 Kecamatan adalah 1.883,33 kilometer persegi. Dengan 9 kecamatan yang berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut.

Batas-batas wilayah secara umum :

- J Sebelah Utara : Kotamadya Makassar, Kabupaten Maros ;
- J Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba dan Bantaeng ;
- J Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto ;
- J Sebelah Barat : Kotamadya Makassar dan Kabupaten Takalar ;

Batas-batas wilayah secara khusus :

No.	Kecamatan	Batas Wilayah				Luas Area (km ²)	Banyaknya Desa/Kelurahan	Sebagian Besar Wilayah
		Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat			
1	Bontonompo	Kec. Bajeng	Kab. Takalar	Bontonompo Selatan	Kab. Takalar	30,39	14	Dataran Rendah
2	Bontonompo Selatan	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar	29,24	9	Dataran Rendah
3	Bajeng	Kec. Pallangga	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	60,09	14	Dataran Rendah
4	Bajeng Barat	Kec. Bajeng	Kec. Bajeng	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar dan Bajeng Barat	19,04	7	Dataran Rendah
5	Pallangga	Kec. Sombaopu	Kec. Bontomarannu	Kec. Bajeng	Kec. Barombong	48,24	16	Dataran Rendah
6	Barombong	Kota Makassar	Kec. Bajeng dan Pallangga	Kec. Bajeng	Kota Makassar	20,67	7	Dataran Rendah
7	Somba Opu	Kota Makassar	Kec. Bontomarannu	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Pallangga dan Kota Makassar	28,09	14	Dataran Rendah
8	Bontomarannu	Kec. Pattalassang	Kec. Parangloe	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Sombaopu	562,63	9	Dataran Rendah
9	Pattalassang	Kab. Maros dan	Kec. Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Sombaopu dan Kec. Pallangga	84,96	8	Dataran Rendah
10	Parangloe	Kab. Maros	Kec. Tinggimoncong	Kec. Manuju	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	221,26	7	Dataran Tinggi
11	Manuju	Kec. Parangloe	Kec. Bungaya	Kec. Bungaya	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	91,9	7	Dataran Tinggi
12	Tinggimoncong	Kab. Maros dan Kec. Tombolo Pao	Kab. Bulukumba dan Kec. Tombolo Pao	Kec. Bontolempangan dan Kab. Bantaeng	Kec. Parangloe dan Kec. Manuju	142,87	7	Dataran Tinggi
13	Tombolo Pao	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Kab. Bululumba	Kec. Tinggimoncong	251,82	9	Dataran Tinggi
14	Parigi	Kec. Tinggimoncong	Kab. Bululumba	Kec. Bungaya	Kec. Parangloe	132,76	5	Dataran Tinggi
15	Bungaya	Kec. Parangloe	Kec. Bontolempangan	Kec. Tompobulu	Kab. Takalar	175,53	7	Dataran Tinggi
16	Bontolempangan	Kec. Parangloe dan Kec. Tinggimoncong	Kec. Tinggimoncong	Kec. Tompobulu	Kec. Bungaya	142,46	8	Dataran Tinggi
17	Tompobulu	Kec. Bontolempangan	Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto dan	132,54	8	Dataran Tinggi
18	Biringbulu	Kec. Bungaya	Kec. Tompobulu	Kab. Jeneponto	Kab. Takalar	218,84	11	Dataran Tinggi

) Sumber : Gowa dalam Angka tahun 2009

B. Persentasi Muzakki dan Mustahiq dalam lingkup BAZDA Kab. Gowa

BAZ Kab. Gowa sebelum memberikan dana zakat produktif kepada mustahiq terlebih dahulu mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari para muzakki. Muzakki yang dimaksud disini adalah seluruh jemaah haji Kab. Gowa yang berangkat setiap tahunnya dan masyarakat yang membawa zakatnya secara langsung ke kantor BAZ Kab. Gowa.

Muzakki inilah yang menjadi sumber dana bagi mustahiq akan tetapi dana tersebut tidak langsung diberikan begitu saja kepada mustahiq. Para mustahiq sebelum mendapatkan bantuan produktif dari BAZ Kab. Gowa terlebih dahulu mereka mengajukan permohonan ke kantor BAZ Kab. Gowa. Setelah mengajukan permohonan, pengurus langsung menindak lanjuti dengan memeriksa berkas permohonan yang harus sesuai dengan persyaratan dan mensurvei lokasi tersebut.

Satu kelompok mustahiq yang diberi dana produktif terdiri dari 5 orang mustahiq. Salah satu dari lima orang tersebut diangkat sebagai ketua kelompok dan mendapat bantuan sebesar lima juta rupiah perkelompok. Kemudian dana tersebut dikembalikan secara berangsur-angsur setiap bulannya. Mustahiq menyeter setiap bulannya seratus ribu perbulan untuk satu orang mustahiq yang dikumpulkan diketua kelompok kemudian ketua kelompok yang membawa ke kantor BAZ Kab. Gowa.

Dari pendataan yang dilakukan pada 18 kecamatan yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan diperoleh data Mustahiq dan Muzakki. Dari data yang ada maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional sehingga pendayagunaannya bisa langsung menyentuh kepada para mustahiq, baik itu berupa

bantuan produktif maupun konsumtif. Sehingga mustahiq dapat memperbaiki taraf hidupnya yang akhirnya bisa menjadi muzakki dan dengan pengelolaan yang profesional maka dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini adalah muzakki untuk membayarkan zakatnya kepada pengelola zakat.

Bantuan zakat produktif berupa modal usaha bergulir kepada kelompok mustahiq di 18 Kecamatan selama 2 tahun terakhir :

Kelompok mustahiq yang mendapat dana bantuan zakat produktif tahun 2009;

NO	NAMA KELOMPOK	KECAMATAN	TANGGAL BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	Kenanga	Somba Opu	30 Januari 2009	5. 000. 000
2	Al Amanah BKPRMI	Somba Opu	30 Januari 2009	5. 000. 000
3	Al – Jihad	Bontomarannu	30 Januari 2009	5. 000. 000
4	Al – Khaerat	Pattallassang	30 Januari 2009	5. 000. 000
5	Al - Ihsan Lanna	Parangloe	30 Januari 2009	5. 000. 000
6	Al - Ikhlas Pattallikang	Manuju	30 Januari 2009	5. 000. 000
7	Damai Malino	Tinggimoncong	30 Januari 2009	5. 000. 000
8	Al - Hasanah Manimbahoi	Parigi	30 Januari 2009	5. 000. 000
9	Mattirobaji	Tombolopao	30 Januari 2009	5. 000. 000
10	Nusa Indah	Pallangga	30 Januari 2009	5. 000. 000
11	Al – Baraqah	Barombong	30 Januari 2009	5. 000. 000
12	Al - Falah Limbung	Bajeng	30 Januari 2009	5. 000. 000
13	Borimatangkasa	Bajeng Barat	30 Januari 2009	5. 000. 000
14	Nirannuang	Bontonompo	30 Januari 2009	5. 000. 000
15	Makkio Baji	Bontonompo Selatan	30 Januari 2009	5. 000. 000
16	Sejahtera Malakaji	Tompobulu	30 Januari 2009	5. 000. 000
17	Al – Jannah	Biringbulu	30 Januari 2009	5. 000. 000
18	Istiqamah	Bungaya	30 Januari 2009	5. 000. 000
19	Bontomanai	Bontolempangan	30 Januari 2009	5. 000. 000
20	Tarbiyah Pesantren	Somba Opu	8 Juni 2009	5. 000. 000
21	Sikanakkuki	Pallangga	8 Juni 2009	5. 000. 000
22	Assamaturu	Barombong	15 September 2009	5. 000. 000

23	Melati	Somba Opu	15 September 2009	5. 000. 000
24	Abnaul Amir	Bontonompo Selatan	15 September 2009	5. 000. 000
25	La'basongko	Somba Opu	15 September 2009	5. 000. 000
26	MT. Banaatul Muhajirin	Somba Opu	15 September 2009	5. 000. 000
JUMLAH				130. 000. 000

Kelompok mustahiq yang mendapat dana bantuan zakat produktif tahun 2010;

NO	NAMA KELOMPOK	KECAMATAN	TANGGAL BANTUAN	JUMLAH BANTUAN
1	Kenanga	Somba Opu	14 April 2010	5. 000. 000
2	Matahari	Somba Opu	14 April 2010	5. 000. 000
3	Cahaya Kenanga	Somba Opu	14 April 2010	5. 000. 000
4	Minasa Indah	Somba Opu	14 April 2010	5. 000. 000
5	Al – Jihad	Bontomarannu	14 April 2010	5. 000. 000
6	Nirannung	Bontomarannu	14 April 2010	5. 000. 000
7	Istiqamah	Pattallassang	14 April 2010	5. 000. 000
8	Al – Ikhsan	Pattallassang	14 April 2010	5. 000. 000
9	Al – Khaerat	Pattallassang	14 April 2010	5. 000. 000
10	Mandiri	Tinggimoncong	14 April 2010	5. 000. 000
11	Bonebaru	Bungaya	14 April 2010	5. 000. 000
12	Istiqamah	Bungaya	14 April 2010	5. 000. 000
13	Al – Baraqah	Barombong	14 April 2010	5. 000. 000
14	Ballalompoa	Barombong	14 April 2010	5. 000. 000
15	Mawar	Tombolopao	14 April 2010	5. 000. 000
16	Mattirobaji	Tombolopao	14 April 2010	5. 000. 000
17	Bontomanai	Bontolempangan	14 April 2010	5. 000. 000
18	Pa'bentengang	Bontolempangan	14 April 2010	5. 000. 000
19	Baji' Ada'	Somba Opu	8 September 2010	5. 000. 000
20	Sejahtera Malakaji	Tompobulu	8 September 2010	5. 000. 000
21	Bontoajaya	Barombong	8 September 2010	5. 000. 000
22	Terasi Instan	Bontonompo Selatan	8 September 2010	5. 000. 000
23	Tikar	Bontonompo Selatan	8 September 2010	5. 000. 000
24	Budaya	Pallangga	8 September 2010	5. 000. 000
25	Sukamaju	Tompobulu	8 September 2010	5. 000. 000
26	Kembang Gula	Somba Opu	8 September 2010	5. 000. 000

27	Nurmanyampa	Pallangga	8 September 2010	5. 000. 000
28	A'bulosibatang	Bajeng	8 September 2010	5. 000. 000
29	Al - Ihsan Lanna	Parangloe	8 September 2010	5. 000. 000
30	Nusa Indah	Pallangga	8 September 2010	5. 000. 000
JUMLAH				150. 000. 000

Data muzakki dalam lingkup BAZ Kab. Gowa selama 3 tahun sebagai berikut :

NO	TAHUN	MUZAKKI	JUMLAH MUZAKKI
1	2009	Jemaah haji	569 orang
		Perorangan	7 orang
2	2010	Jemaah haji	630 orang
		Perorangan	5 orang
3	2011	Jemaah haji	656 orang
		Perorangan	5 orang
JUMLAH			1872 orang

Data di atas diambil dari dokumen-dokumen BAZCAM (Badan Amil Zakat Kecamatan) yang terdiri dari 18 kecamatan yang kemudian disatukan di kantor BAZ kabupaten dan diolah menjadi data secara keseluruhan.

C. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Mustahiq terhadap bantuan dana dari Badan Amil Zakat Kab. Gowa

Penyalahgunaan bantuan dana bergulir sering terjadi dikalangan para mustahiq. Ada yang tidak menyadari bahwa ia telah menyalahgunakan dan ada pula yang sadar bahwa dia telah menyalahgunakannya. Mustahiq yang tidak menyadari bahwa itu penyalahgunaan disebabkan kurangnya pemahaman tentang zakat

produktif. Mustahiq yang menyadari bahwa itu adalah penyalahgunaan disebabkan adanya unsur kesengajaan untuk tidak mengembalikan dana bergulir tersebut. Tidak hanya itu saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan. Adanya seseorang yang telah mempengaruhi mustahiq untuk tidak mengembalikan dana tersebut dengan mengatakan kepada mereka bahwa buat apa dikembalikan dananya kalau dana itu hanya untuk fakir miskin kalimat itulah yang membuat mustahiq enggan mengembalikan dana tersebut.

Penyalahgunaan juga sering dilakukan oleh para ketua kelompok. Setoran yang diterima ketua kelompok dari anggota-anggotanya tidak diserahkan kepada pengurus BAZ Kab. Gowa. Sehingga dana tersebut tidak dapat digulirkan kepada kelompok mustahiq yang lain. Dan seseorang yang ingin bergabung ke kelompok mustahiq yang berada di daerah lain. Setelah ia mendapatkan bantuan dana produktif keberadaannya tidak diketahui.

Berdasarkan data yang diperoleh lapangan penyalahgunaan bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq terhadap Badan Amil Zakat Kab. Gowa sebagai berikut:

NO	BENTUK PENYALAHGUNAAN	JUMLAH MUSTAHIQ YANG BERPENDAPAT	PERSEN %
1	Membeli minuman keras	15	30%
2	Membawa kabur uang setoran	18	36%
3	Tidak mengembalikan setoran	12	24%
4	Tidak adanya kejelasan	5	10%
JUMLAH		50	100%

Sumber: wawancara oleh penulis²

² Tanggal wawancara 1 November 2011, lebih lanjut lihat lampiran daftar informan.

Data diatas merupakan data yang diambil dari mustahiq yang bertempat tinggal diberbagai kecamatan yang ada di Kab. Gowa. Dengan mengambil 50 orang sampel sebagai perwakilan dari seluruh mustahiq yang ada di Kab. Gowa.

Berdasarkan penelitian kebanyakan mustahiq menyalahgunakan dana zakat produktif hanya untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa berpikir panjang. Mustahiq yang ketahuan menyalahgunakan dana zakat produktif maka tidak akan pernah lagi diberi dana zakat. Banyak yang berpendapat bahwa mustahiq menyalahgunakan dana zakat diakibatkan karena kurang memahami zakat produktif.

Pengurus BAZ ketika memberikan pembinaan kepada para mustahiq yang diberi dana zakat produktif, yang hadir tidak sampai 50% dari keseluruhan mustahiq yang mendapat dana produktif. Sehingga mustahiq yang tidak hadir itulah yang biasa menyalahgunakan dana produktif.

Menjadi salah satu faktor mengapa BAZ Kab. Gowa tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Karena banyaknya mustahiq yang menyalahgunakan dana zakat.

D. Manfaat Zakat terhadap Muzakki dan Mustahiq

Memahami manfaat zakat, pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan prefentif bagi terjadinya berbagai kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan.

Adapun beberapa manfaat zakat terhadap para muzakki yakni sebagai berikut :

- a. Zakat mendidik manusia untuk menjauhkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong dan angkuh karena kekayaannya.
- b. Zakat yang dikeluarkan oleh Muzakki merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat terutama oleh kaum yang lemah yang sangat dirasakan manfaatnya. Zakatnya juga menghilangkan monopoli dan penumpukan harta pada sebagian masyarakat, yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial.
- c. Dengan mengeluarkan zakat maka harta itu akan menjadi tumbuh, berkembang dan berkah.
- d. Zakat para muzakki akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan peduli terhadap sesama muslim, memberikan rasa optimisme bagi fakir miskin dan mendorong adanya sistem ekonomi yang berdasarkan kerja sama dan tolong menolong.³

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban orang yang mampu, ternyata memiliki banyak manfaat. Selain berguna membersihkan diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat, manfaat yang paling besar tentu saja membantu orang tidak mampu dan memperbaiki masalah sosial kemasyarakatan.

³ <http://belajarbisnis123.multiply.com/journal/item/13> (10 November 2011).

Berikut beberapa manfaat zakat bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu, di antaranya adalah :

1. Menjauhkan sifat dengki dan benci orang miskin terhadap orang kaya.
2. Mencegah perbuatan dosa, seperti mencuri dan menipu karena harta zakat yang didapat mencukupi kebutuhannya. Zakat juga menciptakan keamanan dan keamanan serta menurunkan kriminalitas. Sebab, semua dilakukan dengan cinta dan ikhlas.
3. Membantu meringankan beban penderitaan orang tak mampu dan membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan seperti keluarga mampu lainnya.
4. Mendatangkan kebaikan dan keberkahan, memupuk sifat tolong-menolong dan tenggang rasa antar individu masyarakat.
5. Zakat akan membantu memenuhi hajat hidup fakir miskin sebagai kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
6. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Ketika harta dibelanjakan, maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak orang yang mengambil manfaat.
7. Bagi orang yang berzakat, hartanya akan diganti dengan berbagai rezeki lainnya.
8. Membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan sifat-sifat buruk lainnya. Zakat juga akan memupuk sifat ikhlas.

9. Dengan zakat, orang akan mendapatkan perlindungan di hari akhir atas sedekah yang dikeluarkan. Allah juga akan memberikan ampunan dan rahmat kepada orang yang berzakat.
10. Zakat akan meningkatkan iman dan ketaqwaan kepadaNya. Juga melebur dan memadamkan kesalahan, seperti air yang mampu memadamkan api.⁴

Beberapa manfaat zakat bagi fakir miskin yang bisa kita petik pelajarannya. Jika Anda orang yang tergolong mampu dan berkecukupan, dan ingin mengeluarkan zakat, serahkan saja urusan zakat ke tangan yang sudah berpengalaman seperti Badan Amil Zakat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

E. Analisis Zakat menurut Hukum Islam

Zakat telah dijadikan sebagai salah satu rukunnya yang lima. Ia merupakan suatu peningkatan kepada sistem yang telah sedia ada di bawah agama-agama langit sebelum itu, yaitu "*Ihsan*". Walaupun kedua sistem ini ada persamaannya dalam sifat sebagai sumbangan pihak yang berada kepada golongan yang memerlukan, namun zakat adalah hak yang boleh dituntut oleh mereka yang berhak menerimanya, berbanding Ihsan yang lebih bersifat sumbangan sukarela

⁴ <http://mitrabisnis-edu.blogspot.com/2011/09/manfaat-zakat-bagi-fakir-miskin.html> (12 November 2011).

saja. Peningkatan ini banyak berasaskan kepada hakikat Islam adalah suatu agama dan cara hidup, atau diistilahkan oleh sebagian orang sebagai *ad-Din*

Agama-agama langit terdahulu hanya bersifat agama saja, kerana itu sumbangan yang diperlukan lebih bersifat keagamaan semata-mata, yaitu *Ihsan*, atau boleh diterjemahkan sebagai simpati. Sedangkan zakat mengandung dua sifat sekaligus, yaitu kewajiban keagamaan dan pada waktu yang sama kewajiban kenegaraan. Sebagai kewajiban agama, orang yang menafikannya dianggap sebagai pendusta agama, dan sebagai kewajiban kenegaraan, orang yang gagal menunaikannya boleh dihukum, sementara mereka yang menentanginya secara berkumpulan boleh diperangi sebagai kumpulan pendurhaka.

Institusi zakat tidaklah merupakan institusi agama atau masyarakat semata-mata, tetapi lebih dari pada itu merupakan juga institusi pentadbiran dan pemerintahan negara. Berasaskan kepada sifatnya ini al-Quran memerintahkan supaya ia diurus oleh pemerintah dan negara sebagai suatu sistem kewangan yang tersusun, dan tidak boleh dibiarkan orang perseorangan atau kumpulan masyarakat untuk melaksanakannya.

Ia bukan urusan individu, atau kelompok masyarakat, tetapi lebih dari itu kerja pemerintah dan negara. Dari perspektif ini skop penglihatan kepada kewajiban zakat ini tidak boleh difokuskan kepada aspek kewajiban memberi atau menunaikannya saja, tetapi juga kepada aspek pentadbiran dan penguatkuasaannya juga. Berasaskan kepada kedudukan inilah maka sejak di zaman Rasulullah s.a.w. lagi para pegawai senantiasa diantar ke daerah-daerah bagi tujuan, antara lain

mengurus pentadbiran zakat sebagai sebagian dari pada pentadbiran negara. Berasaskan kepada kedudukan inilah juga maka para sarjana keuangan Islam, seperti Abu Yusuf, al-Mawardi, Abu Ya'la, Abu 'Ubaid dan banyak lainnya biasanya membahas tentang zakat bukan dalam bab ibadat, tetapi dalam bab keuangan dan percukaian.

Sebahagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah s.w.t untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam al-Quran atau ia juga boleh diertikan dengan kadar tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dan lafaz zakat juga digunakan terhadap bahagian tertentu yang dikeluarkan dari harta orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Situasi yang dihadapi oleh orang-orang miskin pada kenyataannya tidak memungkinkan maksud itu tercapai, dan hal itu sudah merupakan noda hitam yang mengotori muka umat manusia, dimana masyarakat tidak tersentuh lagi oleh nasehat para budiman dan peringatan para cerdik pandai. Seorang ilmuan besar melaporkan kepada kita tentang sejarah hitam hubungan antara orang-orang miskin yang telah berlangsung semenjak kebudayaan-kebudayaan pertama manusia. Katanya, "Pada bangsa apapun peneliti mengarahkan perhatiannya".

Ia selalu hanya akan menemukan dua golongan manusia yang tidak ada ketiganya, yaitu golongan yang berkecukupan dan golongan yang melarat. Dibalik itu selalu didapatkan suatu keadaan yang sangat menarik. Yaitu golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang

melarat selalu semakin kurus sehingga hampir-hampir bercampak diatas tanah, terhempas tak berdaya. Sedangkan orang yang hidup mewah-mewah itu sudah tidak sadar mulai dari mana atap di atasnya runtuh.

Pada dasarnya semua agama, bahkan agama-agama ciptaan manusia yang Tidak mengenal hubungan dengan Kitab suci yang berasal dari langit (Samawi), tidak kutrang perhatiannya pada segi sosial yang tanpa segi ini persaudaraan dan kehidupan yang sentosa tidak mungkin terwujud. Demikianlah dilembah Euftrat-Tigris 4000 s.m. kita menemukan Hummurabi, seseorang yang buat pertamakalinya menyusun peraturan-peraturan tertulis yang masih dapat kita baca sekarang., berkata bahwa Tuhan mengirimnya kedunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah, membimbing manusia, serta menciptakan kemakmuran buat umat manusia. Dan beribu-ribu sebelum masehi orang-orang masehi Mesir kuno selalu merasa menyanggah tugas agama sehingga mengatakan, “Orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakaian, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri bagi orang-orang yang ditimpa hujan badai.

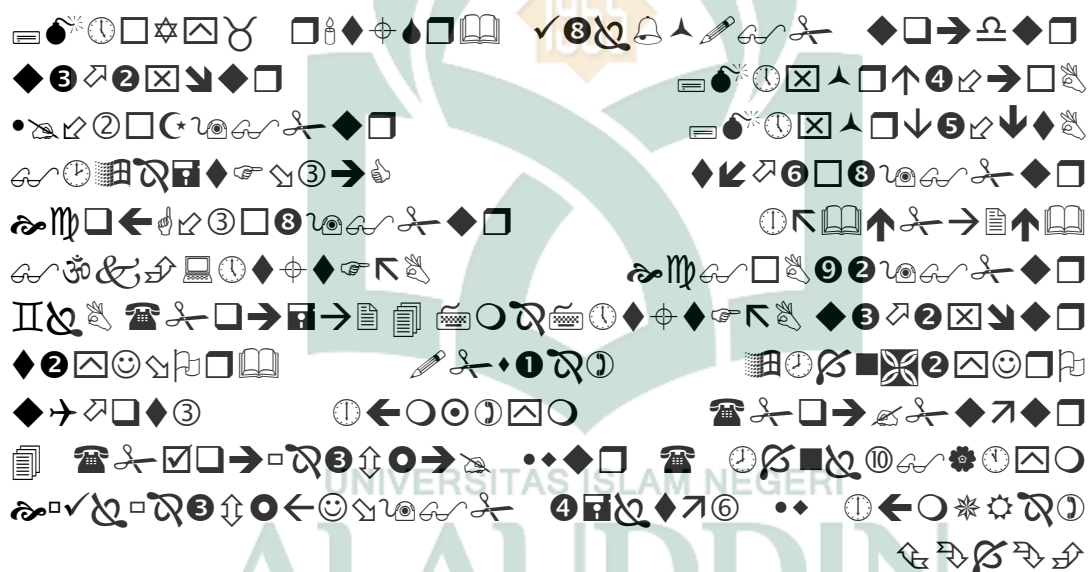
Agama-agama langitlah sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam dampak seruannya dari pada buah pikiran filsafat, agama ciptaan, dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Bila kita membuka Al-Qur'an, pegangan terbaik dari Tuhan bagi manusia yang masih tetap abadi, kita temukan Al-Qur'an berbicara tentang Ibrahim, dan Ya'kub:“Kami jadikan mereka

pemuka-pemuka, yang memimpin menurut perintah kami. Kami wahyukan kepada mereka agar melakukan perbuatan baik-baik, dan mendirikan shalat, membayar zakat, dan menyembah kepada kami. Kemudian apabila kita memeriksa Taurat dan Injil (perjanjian Lama dan perjanjian baru) yang ada sekarang, kita akan bertemu dengan banyak pesan dan nasehat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada fakir miskin, janda-janda yatim, dan orang-orang lemah. Dalam taurat surat Amsal, pasal 21, kita temukan, “Barangsiapa menyumbat telinganya akan tangis orang miskin, maka ia pun kelak akan berteriak, tetapi tiada yang mendengar akan suaranya. Dengan persembahan yang sembunyi orang akan memadamkan murka.”

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa islam semenjak fajarnya baru menyinggung di kota makkah- saat umat islam masih bebera[pa orang dalam hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik sudah mempunyai kitab suci al-Quran yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Al-Qur'an adakalanya merumuskan dengan kata-kata “memberikan makan dan mengajak memberi makan orang-orangmiskin,” dan adakalanya dengan rumusan “memberikan rizki yang diberikan Allah,” “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar zakat,” dan rumusan-rumusan lainnya.

Dalam surat al-Mudatsir, yaitu salah satu surat yang turun pertama, al-Quran memperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa

“orang-orang kana” Muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka dimasukkan kedalam neraka oleh karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan. Dalam al-Quran surah al-An’am. Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang berambat dan yang tidak berambat, pohon kurma, biji-bijian yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan buah delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya bila berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁵

Hal itu sebelum perintah zakat turun, yaitu bahwa orang itu harus menyedekahkan sebagian hasil tanamannya, memberi makan ternak, memberi anak yatim dan orang miskin, serta juga rumput-rumputan.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Syamil, 2007), h. 147.

Sejumlah cara yang dipakai al-Qur'an makkiyah dalam mendorong manusia agar memperhatikan dan memberikan hak-hak fakir miskin supaya mereka itu tidak terlunta-lunta. Cara-cara yang dipakai itu dimahkotai dengan satu cara lain yaitu "dipujinya orang yang berzakat dan dicercanya orang yang tidak membayarnya" sebagaimana jelas terlihat dalam surat-surat Makkiyah tersebut. Dalam al-Qur'an surah ar-Rum, Allah swt memerintahkan agar hak kerabat, orang miskin, dan orang yang terlantar diperjalanan diberikan, dan kemudian memperbandingkan antara riba, yang pada lahirnya tampak seakan-akan menambah kekayaan tetapi pada dasarnya mengurangnya dengan zakat yang pada lahirnya tampak mengurangi kekayaan tetapi pada dasarnya mengembangkan kekayaan itu. Allah berfirman:



Terjemahnya:

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”⁶

Hal yang perlu dicatat dari pernyataan-pernyataan tentang zakat dalam surat-surat yang turun di Makkah itu adalah bahwa pernyataan-pernyataan tersebut tidak dalam bentuk amr ‘Perintah’ yang dengan tegas mengandung arti wajib dilaksanakan, tetap berbentuk kalimat-kalimat berita biasa. Hal itu karena zakat di

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 408.

pandang sebagai ciri utama orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berbuat kebajikan. Yaitu orang yang membayar zakat dan mereka yang melaksanakan zakat, atau orang-orang tertentu yang ditegaskan oleh Allah hidup sukses. Mereka itulah orang-orang yang sukses, atau sebaliknya dinilai sebagai orang-orang musyrik bila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu mereka yang tidak membayar zakat.

Kaum muslimin di Makkah baru merupakan pribadi-pribadi yang dihalagi menjalankan agama mereka, tetapi di Madinah mereka sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena beban tanggungjawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut. Yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran.

Berdasarkan sejumlah hadits dan laporan para sahabat dan setelah kita membaca sejarah penetapan rukun-rukun Islam yang ada sekarang, kita mengetahui bahwa shalat lima waktu adalah rukun pertama yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin, yaitu di makkah pada malam peristiwa Isra' sesuai dengan fakta. Kemudian baru puasa yang diwajibkan di madinah pada tahun 2 H bersamaan dengan zakat fitrah yang merupakan sarana penyucian Dosa, dan perbuatan tidak baik bagi yang berpuasa, dan sarana pemberian bantuan kepada orang-orang miskin pada saat lebaran. Setelah itu barulah diwajibkan zakat kekayaan, yaitu zakat yang sudah tertentu nisab dan besarnya.

Nabi s.a.w. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun islam, dipujinya orang yang melaksanakan dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dapatlah anda baca misalnya peristiwa Jibril mengajarkan agama kepada kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada rasulullah, “Apakah itu Islam?” Nabi menjawab: “Islam Adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Adalah rasulNya, mendirikan Shalat, Membayar Zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan Naik Haji bagi yang mampu melaksanakan .”

Dalam Hadist lain Rasulullah mengatakan bahwa rukun Islam itu lima, yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat, dan ketiga zakat. Rasulullah bersabda:

... "الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا..."

Artinya:

“... Islam itu: 1. Percaya bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sembahyang. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Puasa bulan ramadhan. 5. Pergi haji ke baitullah jika kuasa perjalanannya...”⁷

Zakat di dalam sunnah dan begitu juga dalam al-Qur'an adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak berdiri dengan baik. Perbedaan-perbedaan mendasar antara zakat dalam islam dengan zakat dalam

⁷ H. Salim Bahreisy, *Petunjuk Kejalan Lurus* (Surabaya: Darussagaf, 1977) h. 4-6

Agama-agama lain. Setelah jelas bagi kita zakat itu wajib dan bagaimana kedudukannya dalam islam berdasarkan apa yang dinyatakan oleh al-Qur'an, sunnah, dan ijma', maka kita dapat memberikan catatan penting penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas berbeda sekali dari kebajikan dan perbuatan baik, kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain.

Zakat dalam islam bukanlah hanya sekedar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Ia adalah juga salah satu kemegahan islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadah dalam islam. Orang yang tidak mau membayar zakat itu di nilai fasik dan orang yang mengingkari bahwa ia wajib di pandang kafir. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.

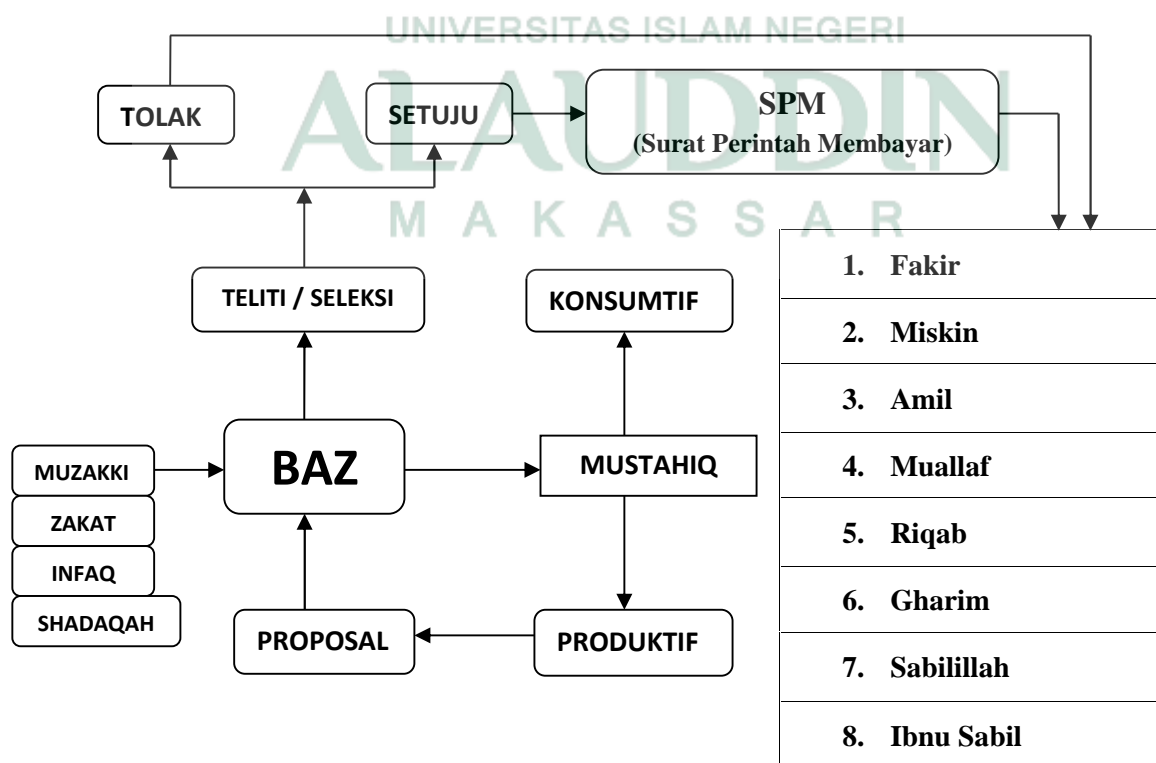
Zakat merupakan “Kewajiban yang sudah ditentukan”, yang oleh agama sudah ditetapkan nisap, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejelas-jelasnya. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu didistribisikannya oleh para amil. Dan zakat itu sendiri merupakan pajak yang harus dipungut, tidak diserahkan kepada kemauan baik seseorang saja. Oleh karena itulah Al-Qur'an mengungkapkannya dengan: pungutlah zakat dari kekayaan mereka dan sunnah mengungkapkannya dengan, “dipungut dari orang-orang kaya”. Berdasarkan ciri-

ciri diatas, dapatlah kita melihat bahwa zakat dalam islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir.

Pajak berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru di pungut orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya, dan diberikan oleh orang-orang yang berkuasa untuk menyombongkan diri untuk berfoya-foya, untuk menyenangkan hati para keluarga dan bawahannya, dan untuk menjaga agar kekuasaan mereka tidak tumbang.

F. Pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kab. Gowa

Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagai berikut:



Muzakki memberikan zakatnya kepada Badan Amil Zakat maka pengurus BAZ mengelola dan mendistribusikannya kepada mustahiq baik secara konsumtif maupun produktif. Pengurus BAZ tidak semata-mata memberikannya begitu saja, apabila zakat itu bersifat konsumtif maka pengurus BAZ cukup mensurvei lokasi mustahiq apabila layak maka dana zakat diberikan secara langsung. Sebaliknya apabila tidak layak maka dana zakat tidak diberikan atau ditolak.

Mustahiq yang ingin mendapatkan dana zakat produktif maka terlebih dahulu mengajukan proposal atau permohonan kepada pengurus BAZ. Setelah mengajukan proposal maka pengurus BAZ menyeleksi secara teliti dan melihat secara langsung lokasi yang ingin diberikan zakat produktif. Pada saat diseleksi dan dilihat secara langsung lokasi tersebut namun tidak memenuhi persyaratan maka pada saat itu juga ditolak dan penyeleksian dihentikan secara otomatis. Dan sebaliknya apabila memenuhi persyaratan maka akan disetujui dan diberikan surat perintah membayar (SPM). Sebelum mensjalankan usahanya para mustahiq diberikan pembinaan agar tidak terlalu banyak kesalahan dalam menjalankan usahanya.

G. Pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan zakat produktif oleh mustahiq

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan

sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap. Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara professional dan produktif, maka pemerintah harus mampu mengangkat amil (pengelolaan zakat) memahami tentang manajemen professional dan produktif. Tugas amilin (pengelola zakat) adalah memberikan informasi atau laporan yang utuh, benar, dan transparan kepada masyarakat pada umumnya. Isi laporan minimal memuat tentang sumber dana zakat dan pengalokasian dana zakat kepada yang berhak menerima. Masyarakat muzakki akan senang bila amilin memberikan informasi yang utuh

tentang program-program yang akan dan telah dilaksanakan, berkaitan dengan dana zakat yang telah dibayarkan oleh muzakki.

Zakat yang dikelola dengan manajemen profesional berarti zakat dikelola menurut program yang terencana dan tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syari'ah. Oleh karena itu, hal yang perlu dicamkan adalah bahwa para pembayar zakat (muzakki) hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya dimanfaatkan. Amilin harus selalu kontak dengan muzakki dan jangan segan-segan memberi ucapan terima kasih kepada para muzakki, sehingga para muzakki tidak ragu dengan aktifitas amil zakat yang ada.

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Kurang bagus nya pengelolaan, potensi itu menjadi kurang bermakna. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pengelolaan secara profesional dan bertanggungjawab. Sebagian besar masyarakat hanya menginginkan zakat secara konsumtif saja. Pada hal kondisi tubuh masyarakat yang mengajukan permohonan

zakat konsumtif jauh lebih sehat ketimbang masyarakat yang mengajukan proposal bantuan dana zakat produktif.

Usaha-usaha yang dirintis oleh Badan Amil Zakat memang masih perlu ditingkatkan lagi. Para pengurus BAZ masih perlu berusaha menyadarkan masyarakat yang menjadi kelompok mustahiq terutama yang menerima zakat produktif. Dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam perturan perundang-undangan tersebut seharusnya mengarah pada pemberdayaan zakat. Artinya, pemerintah harus bertindak lebih memanfaatkan zakat bagi kepentingan umat sesuai dengan tujuan zakat yang dikehendaki oleh syari'ah. Dalam hal pendayagunaan zakat, maka pemerintah harus lebih bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis. Sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat. Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi.⁸

⁸ Muhammad Ridwan Mas'ud *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005) h.117-118.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Membayar zakat berarti seorang muslim telah mempererat hubungannya kepada Allah swt dan hubungannya kepada sesama manusia. Zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka suatu daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang *growth with equity*, yaitu peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan dan peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak berbadan kuat boleh diberi secara konsumtif. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.

Penyalahgunaan zakat produktif sering terjadi karena belum adanya pemahaman-pemahaman yang membuat mustahiq paham yang namanya zakat produktif. Kurangnya kekuatan hukum yang bisa menjerat para pelaku penyalahgunaan zakat.

B. Saran-saran

Pada akhir penyusunan skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengelola zakat harus senantiasa menambah wawasan dan pemahaman tentang pengelolaan zakat.
2. Pengelolaan zakat produktif harus dilakukan secara profesional agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam hal ini adalah Muzakki sehingga mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk dikelola.
3. Para mustahiq harus profesional dalam memanfaatkan dana zakat produktif agar tidak terjadi penyalahgunaan.
4. Adanya transparansi yang dilakukan oleh mustahiq agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap Badan Amal Zakat.
5. Menjalin kerjasama yang baik antara mustahiq, muzakki, dan pengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

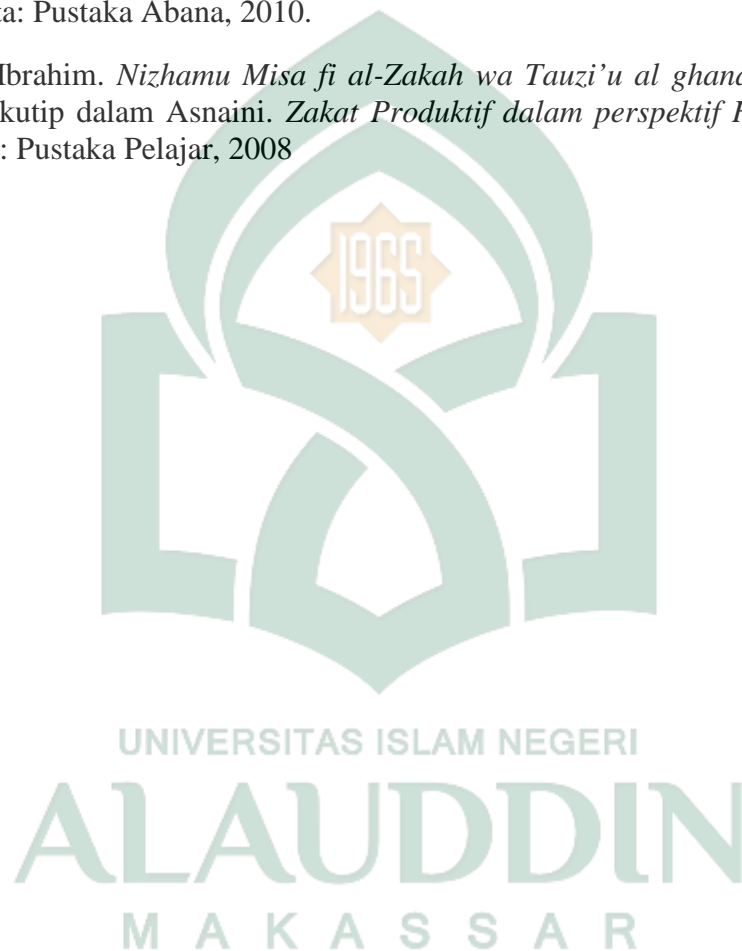
- Abdul Muiz bin Nur, dan Hidayat Arief. *103 Kesalahan dalam Berzakat dan Bersedekah*. Cet. I; Jakarta Timur: Basmallah, 2011.
- Al Mawardi. *Ahkamu Al Sulthaniyyah*, Kuwait: Daar al fikry: t.t. Dikutip dalam Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin. *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*. Cet. I; Solo: Cordova Medeatama, 2010.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim, Terjemah Per-Kata*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. Jakarta: Syamil, 2007.
- Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. *Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat*. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Drs. Abdurrahim MA, dan KH. Mubarak, MA. *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya bagi Umat*. Cet. I; Jakarta: CV. Surya Handayani Pratama, 2002.
- Hawkins. Joyce M. *Kamus dwi bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Oxford: Erlangga, t.t. Dikutip dalam Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008
- Hosein, Ibrahim. *Kerangka Landasan Pemikiran Islam*. Jakarta: Kelompok pemikir masalah-masalah keagamaan Departemen Agama, 1984. Dikutip dalam Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam pendekatan kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- M. Saefuddin, Ahmad. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Cet.I; Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Nashih Ulwan, DR. Abdullah. *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam Empat Madhzhah*. Cet.I; Jakarta: Gadika Pustaka, 2008.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet.II; Yogyakarta: UII Press, 2005.

Shofwan Salehuddin, Wawan. *Risalah Zakat, Infaq, dan Shadaqah*. Cet I; Bandung: Tafakur, 2011.

Thayib Afifi, Ust. Agus dan Ika, Shabira. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Abana, 2010.

Usman Asy Sya'lan, Ibrahim. *Nizhamu Misa fi al-Zakah wa Tauzi'u al ghana'im*. Riyadh: t.p., 1402 H. Dikutip dalam Asnaini. *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*. Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008





Nama : M. Fajrul Mubarak AF
 N I M : 10300107019
 TTL : Sungguminasa, 23 Juni 1989
 Tahun Angkatan : 2007

DAFTAR NILAI
Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Nomor : SI/PP.00.9/ 2012

SEMESTER I					SEMESTER II				SEMESTER III				SEMESTER IV			
No.	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN
1	Bahasa Arab I	2	3	6	Bahasa Arab 2	2	2	4	Bahasa Arab III	2	3	6	Manajemen & Kewirausahaan	2	3	6
2	Bahasa Inggris I	2	3	6	Bahasa Inggris 2	2	3	6	Bahasa Inggris III	2	2	4	Fikih Mawaris	2	3,1	6,2
3	Bahasa Indonesia	2	3	6	Tafsir Wa Ulumuhu	2	3	6	Civic Education	2	3	6	Fikih Siyasah II	2	3	6
4	Akhlak Tasawuf	2	3	6	Hadits Wa Ulumuhu	2	3,5	7	Fikih siyasah I	2	3	6	Fikih Munakahat	2	3	6
5	Teori & Praktek Ibadah	3	4	12	Fiqh Wa Ushuluhu	2	3	6	Fikih Muamalah	2	4	8	Hukum Pidana I	2	4	8
6	Ilmu Hukum	2	3	6	Metodelogy Studi Islam	2	2,5	5	Fikih jinayat 2	2	3	6	Hukum Perdata	2	4	8
7	Sosiologi Hukum	2	3	6	Tarikh Tasyri	2	4	8	Sejarah Peradaban Islam	2	4	8	Hukum Tata Negara	2	3	6
8	Pengantar Ilmu Politik	2	3	6	Fikih Jinayat I	2	3	6	Ushul fikih	2	2	4	Filsafat Hukum Islam	2	3	6
9					Dasar-Dasar Manajemen	2	4	8	Fikih dustury	2	2	4	Hukum Administrasi Negara	2	3	6
10													Hukum Internasional	2	3	6
11													Hukum Perwakafan	2	4	8
	JUMLAH	17		54	JUMLAH	18		56	JUMLAH	18		52	JUMLAH	22		72.2
SEMESTER V					SEMESTER VI				SEMESTER VII				SEMESTER VIII			
No.	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN	Mata Kuliah	SKS	N	KN
1	Legal Drafting	2	4	8	Met Pen Kasus Jin & Siy I	2	3	6	Kajian UU Pidana	2	3	6	KKN	4	4	16
2	Hukum Pidana II	2	4	8	Hukum Acara Pidana	2	4	8	Etika politik	2	4	8	Komprehensif	2		
3	Hukum Acara Perdata	2	3	6	Perb Hukum Pid & F.Jin	2	3	6	Hukum & Konstitusi	2	4	8	Skripsi	6		
4	Ilmu Falak	2	2	4	Taf Ahk wal Jin & Siy I	2	3	6	Perb Hk Antar Negara	2	4	8				
5	Sosiologi Politik	2	3	6	Had Ahk wal Jin & Siy I	2	3	6	Hk Diplomat & Konsuler	2	4	8				
6	Kriminologi	2	4	8	Politik Hukum	2	4	8	Hukum dan Ham	2	4	8				
7	Peradilan Islam	2	4	8	P.Hk Islam Kontemporer	2	4	8	Taf Ahk wal Jin & Siy II	2	4	8				
8	Ilmu Negara	2	4	8	Kaj UU Pidana & Politik	2	4	8	Had Ahk wal Jin & Siy II	2	4	8				
9	Hukum Kewarisan	2	4	8	Fikih Dualy	2	4	8	Praktikum Peradilan	1	4	4				
10	Kepemimpinan Dalam Islam	2	3	6	Ekonomi Syariah II	2	3,3	6,6	Ekonomi Syariah III	2	4	8				
11	Hukum Pajak	2	4	8	Praktikum Falak	1	3,5	3,5	Hk Ac Kons & Penguj UU	2	4	8				
12	Ekonomi Syariah I	2	4	8	Hukum Acara PTUN	2	4	8								
13																
	JUMLAH	24		86	JUMLAH	23		82,1	JUMLAH	21		82	JUMLAH	12		

$$IPK = \frac{KN}{N} = \frac{500,3}{155} = 3,22$$

Makassar, 04 Juli 2011
 Ketua Jurusan HPK,

Drs. Hamzah Hasan M.Hi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

M. Fajrul Mubarak Af akrab di sapa Fajrul lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1989 dari pasangan Drs. H.M. Ahmad Muhajir AF, MH dan St. Faridah Rahman, anak ketiga dari 3 bersaudara. Bertempat tinggal di jalan Ketilang 1 nomor 49 banto-bontoa Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa.

Pada Tahun 1995 masuk di sekolah dasar tepatnya SD Negeri I Sungguminasa. Pada tahun 2001 melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Bahrul Ulum bontorea Kec. Pallangga Kab. Gowa selama 2 tahun dan pada tahun 2003 berpindah di Madrasah Tsanawiyah Aisyiah sungguminasa. Kemudian tahun 2004 mendaftar di Madrasah Aliyah Negri 2 Model Makassar dan menyelesaikan studinya tahun 2007.

Pada tahun 2007 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam. Tahun 2012 berhasil meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pertama di jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

Selama dalam proses pendidikan dari bangku SD sampai mendapat gelar Sarjana (S1) ada beberapa Organisasi yang dimasuki; Pramuka Siaga, Pramuka Pengalang, BKPRMI Kab. Gowa, Remaja Mesjid Al-Amanah, Tk-Tpa Al-Amanah, Himpunan Mahasiswa Jurusan HPK, dan Racana Alauddin 10-073 - 10-074 UIN Aladdin Makassar.